

LAPORAN KINERJA 2014



**LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan LAPORAN KINERJA LAN tahun 2014 ini dengan baik. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tahun 2014 merupakan awal penerapan struktur baru LAN yang lebih terkonsolidasi sehingga menjadi masa transisi, dengan tugas dan fungsi baru yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara. Pada tahun ini pula, merupakan akhir tahap kedua RPJPN 2005-2025, tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan Renstra LAN 2010-2014. Beberapa kegiatan, khususnya terkait pengembangan inovasi administrasi negara, khususnya di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur mulai dilaksanakan pada tahun ini. Di samping itu LAN juga menjalankan amanat baru sebagai instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan. Dengan adanya pembaharuan tersebut, diharapkan LAN semakin meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan administrasi negara.

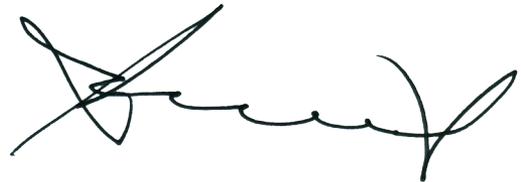
Dinamika perubahan lingkungan yang terjadi pada tahun ini dengan adanya suksesi kepemimpinan nasional berpengaruh pada kinerja organisasi dan tata pemerintahan pada umumnya. Terkait hal tersebut LAN mencoba memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung suksesi kepemimpinan nasional. Selain itu LAN juga senantiasa merespon perubahan kebijakan, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional maupun kebijakan nasional lainnya. Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya pergantian kepemimpinan nasional dapat terlaksana serta program dan kegiatan pada Tahun 2014 dapat terselenggara dengan baik.

Penyampaian LAPORAN KINERJA LAN tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2014. Pencapaian sasaran strategis LAN diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terdapat dalam RENSTRA 2010-2014 LAN yang telah direvisi berdasarkan struktur organisasi yang baru. Sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2014, LAN menetapkan 20 Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi LAN dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai sebagai rujukan bagi pembaharuan administrasi Negara, LAN akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan pembangunan administrasi negara ke depan. Harapan kami, kiranya LAPORAN KINERJA LAN Tahun 2014 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi LAN di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Februari 2015

Kepala Lembaga Administrasi Negara

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Agus Dwiyanto.

Agus Dwiyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Administrasi Negara dengan visinya ‘Menjadi rujukan dalam pembaharuan administrasi negara’ terus berupaya menjalankan peran yang strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pada bidang pembangunan aparatur Negara sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPN 2005-2025. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LAN diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran jangka menengah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Secara umum program dan kegiatan LAN pada tahun 2014 ini meliputi kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, pengembangan ilmu administrasi negara, peningkatan pengkajian kebijakan dan pembinaan analisis kebijakan, serta pengembangan inovasi di bidang administrasi.

Kinerja Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2014, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja LAN 2014. Terdapat 7 Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program /kegiatan sepanjang tahun 2014. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, ditetapkan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja LAN 2014. Secara umum terdapat 6 IKU yang tercapai sesuai dengan targetnya atau tercapai 100%, 9 IKU yang tercapai melebihi target atau tercapai diatas 100%, dan 4 IKU yang capaiannya kurang dari target. Selain itu terdapat yang tidak ada capaiannya, yakni IKU tentang Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi. Hal ini karena kebijakan pemotongan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan pertimbangan kebijakan institusi terkait dengan upaya reformasi kediklatan, sehingga kegiatan akreditasi ditunda pelaksanaannya. Namun secara keseluruhan rata-rata IKU LAN tahun 2014 tercapai sebesar 100,87% Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i>	100%	100%	100%
Persentase <i>policy paper/policy brief</i> yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan	100%	100%	100%

Tahun 2014 LAN melaksanakan 13 kajian kebijakan dan telah seluruhnya disebarluaskan kepada *stakeholders*. Selain itu IKU persentase *policy paper/policy brief* yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan ini merupakan IKU baru pada tahun 2014. Secara umum untuk sasaran yang pertama ini IKU dapat dicapai 100%.

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya pembaharuan administrasi negara

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan	2 Model	3 Model	150%

Indikator Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan mengukur sejauh mana LAN menghasilkan produk inovasi Administrasi Negara. Indikator ini diukur dari banyaknya model/produk inovasi Administrasi Negara yang dihasilkan oleh LAN. Pada tahun 2014, LAN dihasilkan 3 (tiga) model/produk inovasi administrasi negara, yakni : Arsitektur Kabinet 2014-2019 yang merupakan inovasi di bidang kelembagaan, Portal Inovasi dan Direktori Inovasi Administrasi Negara, dan Handbook Inovasi Administrasi Negara. Pada tahun 2014 ini kegiatan LAN dalam bidang pengembangan dan praktek inovasi administrasi negara lebih banyak berupa inovasi administrasi negara yang diarahkan untuk meningkatkan *awareness* terhadap inovasi administrasi negara dan pengembangan konsep-konsep maupun panduan yang mendorong berkembangnya inovasi administrasi negara.

SASARAN STRATEGIS 3

Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	9 Lembaga Diklat	-	-
Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang profesional	90%	96,47%	107,19%
Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan	60%	55,65%	92,75%
Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim	80%	95,99%	119,99%
Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar	100%	78,82%	78,82%
Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur	Baik	Baik	100%

Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi tidak dapat diukur, karena kegiatan akreditasi lembaga diklat tidak jadi dilaksanakan ditahun 2014 ini. Hal ini dikarenakan instrumen akreditasi belum disesuaikan dengan diklat pola baru dan adanya kebijakan penghematan dan pemotongan, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang profesional. Indikator ini dapat tercapai karena jumlah peserta dan lulus dalam diklat ToF melebihi target 90% yang telah ditetapkan, meskipun belum mencapai 100% dari rencana peserta.

Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan. Pada tahun 2014 ini mulai dilaksanakan Diklatpim pola baru, yang mengalami banyak perubahan dari pola lama antara lain dalam hal persyaratan kelulusan yang lebih ketat, sehingga diharapkan lebih dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas lulusannya. Hasil dari Diklatpim di LAN dari 947 peserta Diklatpim, hanya 527 peserta dengan predikat kelulusan minimal memuaskan. Peserta yang lulus dalam Diklatpim pola Baru dikategorikan sebagai pemimpin perubahan. Dari 947 peserta diklat, terdapat 909 peserta yang lulus (95,99%). Dengan target 80%, maka capaian indikator kinerja adalah **119,99%**.

Penilaian penyelenggaraan Diklat sesuai standar didasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala LAN. Capaian untuk penyelenggaraan diklat yang sesuai standar tahun ini adalah 57 dari 73 penyelenggaraan diklat atau 78,82%. Dengan target 100%, maka capaian indikator kinerja adalah 78,82%.

Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur diukur melalui survey dengan menyebarkan kuesioner evaluasi penyelenggaraan diklat kepada peserta diklat langsung sebagai pengguna diklat dan dilaksanakan setiap akhir masing-masing mata diklat. Berdasarkan survey, rata-rata tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur adalah 4,39 (dalam range kategori 'Baik'). Dengan target 'Baik', maka dapat dikatakan untuk indikator kinerja ini tercapai 100%.

Capaian tahun 2014 ini perlu mendapat catatan karena merupakan awal penerapan Diklat Pola Baru, sehingga capaiannya tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS 4

Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan yang berkualitas

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat widyaiswara dan analisis kebijakan	100%	103%	103%
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan	Memuaskan	Memuaskan	100%
Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi	50%	60%	120%

Persentase Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Analisis Kebijakan dengan target 2 pedoman (100%) dapat dilaksanakan oleh LAN, bahkan melebihi yaitu sebanyak 4 produk kebijakan (200%). Hal ini antara lain terkait dengan kebutuhan kebijakan/instrumen pembinaan JFAK mendesak untuk diterbitkan.

Sementara terkait dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, dari evaluasi yang telah dilakukan, *stakeholders* menyatakan kepuasan mereka terhadap layanan administrasi kewidyaiswaraan yang telah diberikan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara. Namun demikian perbaikan dalam pelayanan kewidyaiswaraan perlu dilakukan antara lain dengan menerapkan standar pelayanan kewidyaiswaraan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi, dari target sebesar 50% peserta uji kompetensi yang direncanakan, dapat dicapai bahkan melebihi, yakni 60%. Sebanyak 17 orang direkomendasikan untuk menjadi analisis kebijakan.

SASARAN STRATEGIS 5

Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan fasilitasi dengan jumlah kegiatan fasilitasi yang dapat dipenuhi (selesai), dengan angka pencapaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%. Fasilitasi yang dilakukan antara lain di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, SDM aparatur dan kediklatan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya. Ke depan, LAN perlu terus meningkatkan kualitas fasilitasi yang diberikan dan meningkatkan monitoring fasilitasi.

SASARAN STRATEGIS 6

Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi	30	43	143%
Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan	S1 : 75% S2 : 65%	S1 : 79,21% S2 : 41,24%	84,53%

Dari target sebesar 30 yang ditetapkan, LAN berhasil menghasilkan 43 penerbitan di berbagai media seperti jurnal, buku, forum ilmiah dalam negeri maupun internasional. LAN perlu lebih mendorong pegawai untuk menerbitkan artikel /tulisan ilmiah dalam bentuk buku atau pada berbagai jurnal eksternal yang terakreditasi. Diperlukan pula peningkatan kapasitas untuk berkontribusi pada forum internasional.

Untuk persentase lulusan S1 dengan predikat memuaskan ($IPK \geq 3$ dan masa studi maksimal 5 tahun) adalah 79,21%. Sementara persentase lulusan S2 dengan predikat memuaskan ($IPK \geq 3,25$ dan masa studi maksimal 2 tahun) adalah 41,24%. Secara keseluruhan capaian IKU ini adalah **84,53%**.

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang professional, serta akuntabilitas lembaga

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN	WTP	WTP	100%
Skor evaluasi SAKIP LAN	70	70,03	100,04%
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan	705 orang	752 orang	106.67%
Tingkat disiplin pegawai	80%	98.74%	123.42%
Indeks kesiapan Penerapan e-government	2	1.98	99%

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara untuk indikator kinerja yang kedua, Skor Evaluasi Sakip LAN, dari target nilai 70, tercapai nilai 70,03 (predikat B). Di dibandingkan dengan nilai Akuntabilitas K/L secara nasional yang mencapai 63.18, pada tahun 2014, nilai akuntabilitas LAN berada di atas nilai nasional.

Sementara terkait dengan manajemen kepegawaian, untuk indikator Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan, dari target 705 orang, dicapai 752 orang yang mendapatkan pengembangan, baik melalui Pendidikan formal (tugas belajar dan Ijin Belajar), seminar/workshop, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan, maupun diklat prajabatan. Selain itu dilakukan pula uji kompetensi bagi pegawai. Sedangkan tingkat disiplin pegawai tahun 2014 yang diukur dari rata-rata kehadiran selama setahun mencapai 98.78%.

Untuk Indeks kesiapan Penerapan e-government, digunakan Hasil Pemingkata e-Governemnt Indonesia (PeGI). Skor PeGI Lembaga Administrsai Negara tahun 2014 adalah 1,98. Hasil ini kurang dari target yang ditetapkan LAN (sedang atau equivalent dengan nilai PeGi 2). Di banding dengan K/L lainnya, hasil PeGI LAN masih dikategorikan kurang. Namun demikian, LAN telah berupaya mengintensifkan

pengembangan IT-nya. Pengumpulan data PeGi 2014 pada Lembaga Administrasi Negara dilakukan pada Januari 2014, sehingga upaya perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan oleh LAN belum terekam dalam data PeGI 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun pembuktian LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang telah menetapkan langkah untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Tahun ini menandai akhir pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi LAN 2011-2014, di mana hampir seluruh program yang dicanangkan telah dilaksanakan. Hasilnya, pada tahun 2014 LAN mendapatkan penilaian Indeks RB LAN sebesar 60,59, termasuk dalam kategori B. Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indeks RB LAN dapat dikatakan baik. Dari 76 K/L terdapat 3 K/L (3.9%) yang mendapat nilai BB. Sebanyak 20 (26%) dari 76 K/L mendapat nilai B, termasuk LAN. Sementara 29 K/L (38%) mendapat nilai CC dan 24 K/L (31%).

Dengan hasil tersebut, LAN telah menentukan sejumlah langkah kongkrit untuk terus melaksanakan reformasi antara lain dengan terus melakukan inovasi dalam pelayanan, perbaikan pada 8 area perubahan dan konsisten melaksanakan langkah-langkah reformasi birokrasi secara berkesinambungan.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, pada tahun anggaran 2014, LAN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.236.818.273.000 (dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). Namun dalam perkembangannya terdapat kebijakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 pada tanggal 17 Mei 2014, tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tertanggal 14 Juni 2014, tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2014. Jumlah pemotongan untuk LAN mencapai Rp 14.117.876.000 sehingga pagu anggaran LAN berubah menjadi sebesar Rp.222.099.168.000 (dua ratus dua puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Kebijakan ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di LAN, karena beberapa kegiatan mengalami pengurangan anggaran bahkan ada yang dihapuskan, seperti kegiatan Diklat Reform Leader Agency, dan Akreditasi Lembaga Diklat.

Di bandingkan dengan perolehan pagu anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.280.464,766.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), maka pada Tahun 2014 pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 58.365.598.000 (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga ratus Enam puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sementara persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan Lembaga Administrasi Negara bila dibandingkan dengan penyerapan tahun 2013 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013 persentase realisasi anggaran hanya mencapai 87.4%, sedangkan Tahun 2014 meningkat menjadi 94,78%. Peningkatan ini di

sebabkan oleh semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang telah di susun oleh masing-masing unit kerja yang ada, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat di realisasikan.

Adapun perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama LAN Tahun 2010-2014, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Realisasi IKU Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada *stakeholders* dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dicapai sebesar 100 persen.
2. IKU Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar tercapai sebesar 87,18 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 indikator ini tercapai 78,82%.
3. Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan pada tahun 2010 tercapai sebesar 30.96 persen. IKU ini mengalami peningkatan menjadi 39.65 persen pada tahun 2012 dan menjadi 52.44 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013, IKU persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan hanya tercapai sebesar 46.1 persen. Tahun 2014 indikator ini mencapai 55,65%. Meskipun demikian capaian tahun 2014 ini perlu mendapat catatan karena merupakan awal penerapan Diklat Pola Baru, sehingga penilaian yang dilakukan juga mengalami perubahan.
4. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur dari tahun 2010 sampai dengan 2013 berada pada kriteria 'Baik'. Tahun 2014 penyelenggaraan Diklat Aparatur juga secara umum dinilai 'Baik' oleh para peserta.
5. Indikator Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tercapai sebesar 100 persen.
6. Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi mengalami peningkatan dari 32 penerbitan pada tahun 2010 menjadi 55 penerbitan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 meningkat menjadi 65 penerbitan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penerbitan karya tulis ilmiah yang dihasilkan lebih rendah sebanyak 43. Hal ini terkait dengan perampingan organisasi di LAN yang berimplikasi pada berkurangnya unit kajian yang sebelumnya menerbitkan beberapa karya ilmiah dan berkurangnya kegiatan kajian. Kondisi ini telah diprediksikan sebelumnya sehingga target yang ditetapkan pada tahun ini hanya 30. Selain itu kebijakan pemotongan anggaran yang berimplikasi pada pemotongan anggaran pada beberapa jurnal dan pengurangan anggaran untuk mengirimkan delegasi pada forum konferensi internasional di luar Indonesia,
7. Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun mengalami peningkatan dari 50 persen pada tahun 2010 dan menjadi

83.85persen pada tahun 2011. Tahun 2012 capaian ini mengalami penurunan menjadi 73.5 persen dan 71.06 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 dicapai sebesar 79,21%.

8. LAN berhasil mempertahankan Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN dengan predikat WTP sepanjang tahun 2010-2014. Hasil ini telah dicapai tujuh tahun berturut-turut (LK Tahun 2007-Tahun 2013)
9. Hasil Evaluasi SAKIP LAN mengalami perbaikan dari penilaian CC pada tahun 2010 dan 2011 menjadi B pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Adapun untuk skor Evaluasi SAKIP tersebut tercatat adanya peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2014 pada berbagai aspek yang dinilai.

Laporan Kinerja LAN Tahun 2014 menjadi laporan akhir periode pelaksanaan Renstra LAN 2010-2014 setelah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Lembaga Administrasi Negara untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu ke depan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut LAN akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	2
Tugas dan Fungsi serta Peran Strategis LAN dalam Pembangunan Administrasi Negara.....	2
Struktur Organisasi	4
Isu-Isu Strategis dan Peran LAN	8
BAB II Perencanaan Kinerja	11
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	12
Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014	12
Penetapan Kinerja Tahun 2014.....	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja Kinerja	19
Capaian Kinerja Organisasi	20
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Strategis	20
Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
BAB IV Penutup	73

BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang

**Tugas dan fungsi serta Peran Strategis LAN dalam
Pembangunan Administrasi Negara**

Struktur Organisasi

Isu-Isu Strategis dan Peran LAN

Bagian ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1 Latar Belakang

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara. Tahun 2014 merupakan tahun pembuktian LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang telah menetapkan langkah untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Serangkaian rencana/strategi reformasi yang telah dirancang dan disepakati telah dilaksanakan dan dalam skala lebih besar merupakan bentuk transformasi organisasi.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LAPORAN KINERJA yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LAPORAN KINERJA LAN tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis LAN yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2010-2014 LAN, khususnya yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014. Disamping itu penyusunan LAPORAN KINERJA ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja LAN di masa yang akan datang.

1.2 Tugas dan fungsi serta Peran Strategis LAN dalam Pembangunan Administrasi Negara

Transformasi organisasi yang telah dilakukan LAN lebih tepat dipahami sebagai upaya penguatan organisasi LAN dalam segala dimensinya. Penguatan yang dilakukan itu diambil sebagai upaya untuk menemukan dan menafsirkan kembali peran-peran strategis yang akan dilakukan oleh LAN pada masa mendatang berdasarkan situasi dan konteks aktual, dengan semangat yang sama seperti ketika LAN pertama dibentuk pada tahun 1957. Disepakati tiga fungsi utama yang menjadi fokus LAN, yaitu Kajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, serta Inovasi Administrasi Negara. Dari titik inilah sejarah baru LAN telah dimulai dan beberapa langkah transformasi telah ditetapkan yang diawali dengan redefinisi tugas dan fungsi LAN.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAN menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
2. Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan dan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;
3. Pengembangan inovasi administrasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur;
4. Pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi Negara; dan
5. Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LAN dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

01 Sekretariat Utama

Sekretariat Utama dipimpin oleh pejabat eselon I dengan nomenklatur Sekretaris Utama. Sekretaris Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN. Sekretaris utama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan di lingkungan LAN
- 2) Koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan LAN
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan



dokumentasi di lingkungan LAN

- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro PH2P); dan
- b. Biro Umum.

02 **Deputi Bidang Kajian Kebijakan**

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dipimpin oleh pejabat eselon I dengan nomenklatur deputi. Deputi Bidang Kajian Kebijakan atau Deputi I merupakan unsur pelaksana sebagaimana tugas dan fungsi LAN di bidang kajian kebijakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi I mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi Negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan.

Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan.
- 2) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian dan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.



Deputi I terdiri atas:

- a. Pusat Kajian Reformasi Administrasi
- b. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara
- c. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah; dan
- d. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

03 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur atau Deputi II dipimpin oleh seorang pejabat eselon I dengan nomenklatur deputi. Deputi II merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara.

Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan, melaksanakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara
- 2) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara dan
- 3) Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala

Deputi II terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Pusat Pembinaan Widyaiswara
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional; dan
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.



04 **Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara**

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara atau Deputi III dipimpin oleh seorang pejabat eselon I dengan nomenklatur deputi. Deputi III merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang inovasi administrasi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi III mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur
- 2) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik sertakelembagaan dan sumber daya aparatur; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi III terdiri atas:

- a. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
- b. Pusat Inovasi Pelayanan Publik
- c. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur dan
- d. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas.

05 **Inspektorat**

Inspektorat adalah unsur pengawasan internal LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LAN. Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat



Unsur pelaksana lain adalah PKP2A dan STIA, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

06 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Di lingkungan LAN dibentuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut PKP2A LAN sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.

PKP2A LAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan secara substantif dikoordinasikan oleh Deputi terkait. PKP2A LAN dipimpin oleh Kepala Pusat, PKP2A meliputi:

- PKP2A I berkedudukan di Jatinangor
- PKP2A II berkedudukan di Makassar
- PKP2A III berkedudukan di Samarinda
- PKP2A IV berkedudukan di Aceh.



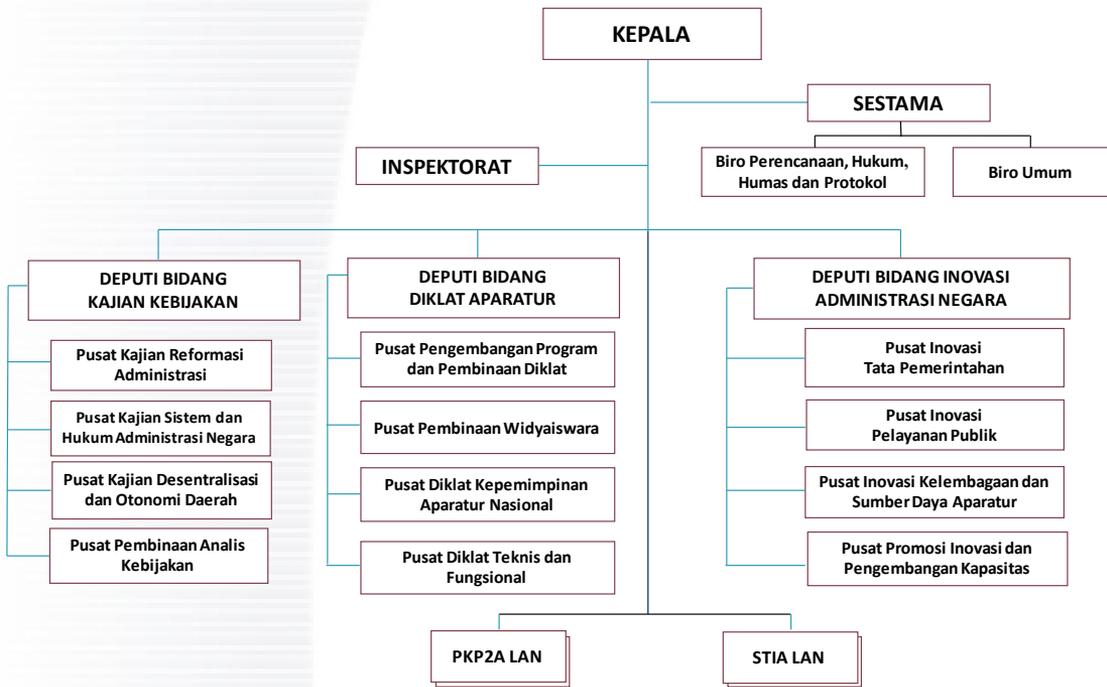
07 STIA

Adapun STIA LAN merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang berkedudukan di Jakarta, Bandung, dan Makassar dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang ilmu administrasi bagi pegawai negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, STIA LAN menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu administrasi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu administrasi;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan civitas akademik; dan
- Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan terhadap sarana dan prasarana.



Bagan Struktur Organisasi LAN seluruhnya dapat dilihat sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini :



1.4 Isu-Isu Strategis dan Peran LAN

Bidang pembangunan aparatur negara merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia banyak dipengaruhi kualitas aparatur negara dan buruknya tata pemerintahan baik pada level nasional maupun daerah. Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk mengembangkan bidang administrasi negara dan meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara negara, memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur negara.

Implementasi pembangunan aparatur negara yang dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Upaya pembangunan aparatur negara yang diwujudkan dalam beberapa fokus diarahkan untuk mewujudkan aparatur negara yang melayani, profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LAN yang didukung oleh sumber daya manusia dengan kompetensi spesifik dalam bidang administrasi negara diharapkan mampu menjalankan peran yang strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pada bidang pembangunan aparatur negara.

Pemantapan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Instansi sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi LAN. Secara internal LAN dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi. Di sisi lain dengan momentum tersebut LAN juga dituntut mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses Reformasi Birokrasi di Indonesia dengan mendorong transformasi administrasi negara melalui perannya yang diwujudkan dalam pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Presiden, Pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS, profesionalitas SDM Aparatur, Inovasi Administrasi Negara, maupun pengembangan ilmu dan praktik di bidang Administrasi.

Isu strategis yang juga menjadi tantangan Indonesia di tahun 2014 antara lain terkait pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Rencana pemberlakuan MEA/AEC 2015 ini bukan merupakan perkara yang ringan, karena tenggat waktu penyiapan untuk menyambut momentum tersebut sudah tidak tersedia. Oleh karena itu, tahun 2014 merupakan waktu yang cukup berat bagi negara Indonesia apakah siap atau tidak dalam memasuki MEA/AEC 2015 yang saat ini sudah mulai bergulir. Beberapa kajian/penelitian LAN mencoba memberikan rekomendasi terkait persiapan yang dapat dilakukan.

Tahun 2014, seiring dengan berakhirnya masa kerja anggota DPR RI periode 2010-2014, telah lahir beberapa undang-undang terkait birokrasi pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu terkait dengan pemerintahan daerah, pada tahun ini pula terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fakta yang menarik adalah pada saat yang hampir bersamaan telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena terjadinya penolakan terhadap klausul pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam hubungan tersebut, LAN mencoba merespon dengan melakukan serangkaian kajian/penelitian maupun diskusi isu-isu strategik. Sebagai contoh, melalui seminar terkait pemerintahan daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan policy paper/policy brief terkait dengan pokok permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (terkait ASN), Evaluasi Model Reformasi Birokrasi di Indonesia (terkait RB), telaahan pemerintahan desa (terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), integrasi perencanaan dan

penganggaran (terkait penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan K/L/D), kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015 (tantangan eksternal), dan sebagainya.

Adapun di bidang diklat, LAN telah melakukan perubahan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dari level terendah (prajabatan) hingga level tertinggi (diklatpim tingkat I) dengan sebutan “Diklat Kepemimpinan Pola Baru”. Selain itu pula, LAN senantiasa melaksanakan tugasnya dalam akreditasi, fasilitasi, dan evaluasi lembaga-lembaga diklat yang berada di K/L maupun di daerah. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan “pembina Diklat”, LAN selalu berupaya memperbaiki komponen pendukung keberhasilan diklat itu sendiri yang meliputi komponen atau perangkat lunak (widyaiswara, kurikulum, dsb) dan perangkat keras (modul, gedung, dsb).

Isu lain yang tidak kalah penting terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola adalah terkait inovasi di bidang administrasi negara. Saat ini diakui telah cukup banyak inovasi yang muncul ke permukaan baik di level pusat maupun daerah. Semangat melakukan inovasi bidang administrasi negara pun sudah sejalan dengan peraturan perundangan khususnya di level pemerintahan daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Akan tetapi, inovasi-inovasi tersebut perlu mendapatkan “kerangka” yang memadai agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari serta dapat dipertahankan sebagai nilai positif bagi keberhasilan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Inovasi bukan hanya sebagai sesuatu hal yang berbeda dengan yang lainnya, tetapi hendaknya inovasi tersebut memiliki arah yang jelas ke depan dan mampu menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk mereplikasinya di tempat lain.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Rencana Strategis LAN Tahun 2010 - 2014
Penetapan Kinerja Tahun 2014

Perencanaan kinerja merupakan aspek penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai berikut indikator keberhasilan pencapaiannya. Perencanaan kinerja LAN memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi nasional. Bab ini merangkum ikhtisar perencanaan kinerja Lembaga Administrasi Negara tahun 2014 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2014.

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

RPJP tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN 2010-2014) yang menitikberatkan pada upaya: Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni:

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi
- d. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

2.2 Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara telah menyusun Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 – 2014 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan LAN untuk periode lima tahun yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014. Rencana Strategis ini telah direview dan disesuaikan dengan struktur organisasi LAN yang baru. Secara ringkas substansi Renstra LAN Tahun 2010 – 2014 hasil review tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

01 **Visi**
Visi LAN paska restrukturisasi organisasi:

“Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara”

02 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, LAN telah menetapkan 4 (empat) misi yang dilakukan secara berkesinambungan yaitu:

1. Pengembangan inovasi administrasi Negara
2. Pengkajian kebijakan dan pembinaan analisis kebijakan
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara
4. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi

03 Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, LAN menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2014. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik, Tujuh tujuan strategis LAN tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hasil kajian kebijakan;
- 2) Mewujudkan pembaharuan administrasi negara;
- 3) Mewujudkan sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang professional;
- 4) Menerbitkan kebijakan/ pedoman/ konsep/ instrumen pembinaan widyaiswara dan analisis kebijakan;
- 5) Memberikan pelayanan fasilitasi yang professional di bidang administrasi negara;
- 6) Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara; dan
- 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi LAN, secara kongkrit, upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis LAN tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan	1.1. Persentase Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders 1.2. Persentase Policy Paper/Policy Brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan

2	Terwujudnya pembaharuan administrasi negara	2.1. Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan
3	Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional	3.1. Jumlah Lembaga diklat yang terakreditasi 3.2. Ketersediaan fasilitator Diklat Pim yang profesional 3.4. Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan 3.5. Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim 3.6. Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar 3.7. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur
4	Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan yang berkualitas	4.1. Persentase kebijakan / pedoman / konsep/ instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan 4.2. Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan 4.3. Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi
5	Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi	5.1. Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi
6	Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara	6.1. Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi 6.2. Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan
7	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	7.1. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN 7.2. Skor Evaluasi SAKIP LAN 7.3. Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan 7.4. Tingkat disiplin pegawai 7.5. Indeks Kesiapan Penerapan E-Government

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja 2014 menjadi pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 2014 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja 2014 ditetapkan untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAN telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan	1.1 Persentase Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders	100%
		1.2 Persentase Policy Paper/Policy Brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan	100%
2	Terwujudnya pembaharuan administrasi negara	2.1 Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan	2 model

3	Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional	3.1 Jumlah Lembaga diklat yang terakreditasi	9 Lembaga Diklat
		3.2 Ketersediaan fasilitator Diklat Pim yang profesional	90%
		3.3 Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan	60%
		3.4 Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim	80%
		3.5 Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar	100%
		3.6 Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur	Baik
4	Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan yang berkualitas	4.1 Persentase kebijakan/ pedoman / konsep / instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan	100%
		4.2 Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan	Memuaskan
		4.3 Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi	50%
5	Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi	5.1 Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi	100%
6	Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara	6.1 Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi	30
		6.2 Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan	S1 = 75% S2 = 65%

7	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	7.1 Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN	WTP
		7.2 Skor Evaluasi SAKIP LAN	70
		7.3 Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan	95%
		7.4 Tingkat disiplin pegawai	80%
		7.5 Indeks Kesiapan Penerapan E-Government	Sedang (Skor PeGI =2)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Capaian Kinerja Organisasi
Rencana Strategis LAN Tahun 2010 - 2014
Penetapan Kinerja Tahun 2014

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja LAN pada tahun 2014 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra LAN 2010 – 2014 yang telah direvisi paska perubahan organisasi, dan dituangkan lebih lanjut dalam Penetapan Kinerja LAN 2014. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima LAN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pencapaian kinerja LAN.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

1.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Strategis

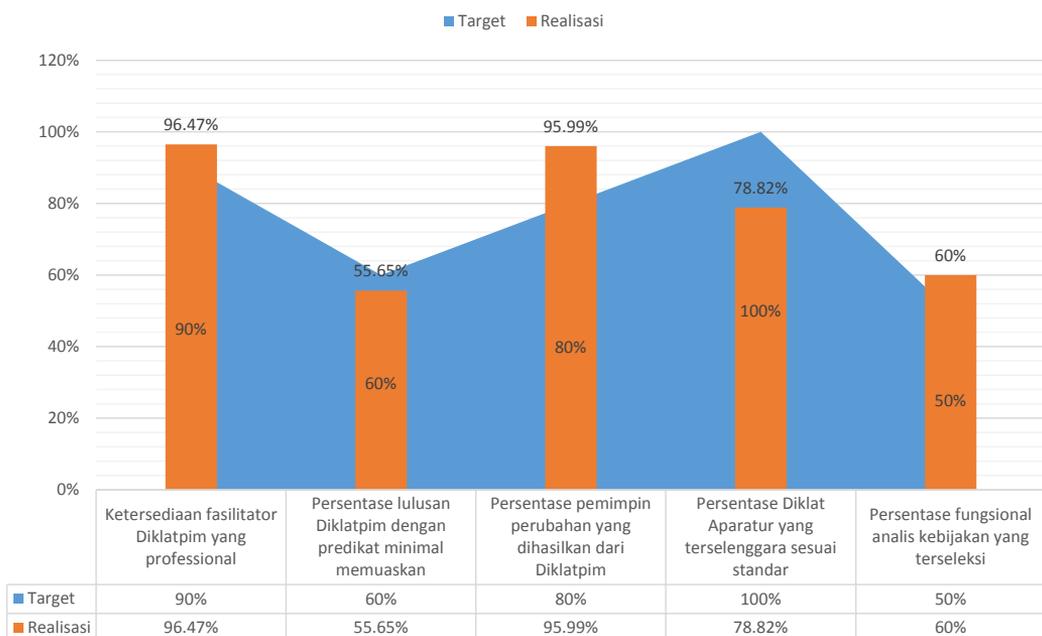
Pada tahun 2014, LAN menetapkan 7 sasaran dengan 20 IKU yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian seluruh IKU tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan	Persentase Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders	100%	100%	100%
		Persentase Policy Paper/Policy Brief yang dihasilkan dari kajian/ telaah kebijakan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya pembaharuan administrasi negara	Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan	2 model	3 model	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
3	Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional	Jumlah Lembaga diklat yang terakreditasi	9 Lembaga Diklat	-	-
		Ketersediaan fasilitator Diklat Pim yang profesional	90%	96,47%	107,19%
		Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan	60%	55,65%	92,75%
		Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim	80%	95,99%	119,99%
		Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar	100%	78,82%	78,82%
		Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur	Baik	Baik	Baik
4	Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan yang berkualitas	Persentase kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analisis kebijakan	100%	103%	103%
		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
		Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi	50%	60%	120%
5	Profesionalisme pelaksanaan fasilitasi	Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
6	Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara	Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi	30	43	143%
		Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan	S1 = 75% S2 = 65%	S1 : 79,21% S2 : 41,24%	84,53%
7	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN	WTP	WTP	100%
		Skor Evaluasi SAKIP LAN	70	70,03	100,04%
		Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan	705 orang	752 orang	106,67%
		Tingkat disiplin pegawai	80%	98.74%	123.42%
		Indeks Kesiapan Penerapan E-Government	Sedang (Skor PeGI =2)	1.98	99%

Ikhtisar Capaian IKU 2014



Dari 20 indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil dicapai 16 IKU yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun, bahkan satu indikator dapat melebihi target, sedangkan empat indikator yang belum tercapai targetnya. Untuk indikator Persentase hasil kajian kebijakan LAN yang didesiminasikan kepada stakeholders, Persentase policy paper/policy brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan, Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur, Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi, Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN, Skor evaluasi SAKIP LAN tercapai 100%. Sedangkan indikator Jumlah produk inovasi administrasi Negara yang dihasilkan, Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang profesional, Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim, Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi, Jumlah karya tulis ilmiah bidang Ilmu administrasi yang terpublikasi, Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan, dan Tingkat disiplin pegawai melebihi target yang ditetapkan.

Adapun indikator yang belum memenuhi target adalah Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan, Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan, Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar, dan Indeks kesiapan Percepatan e-government.

Terkait tidak tercapainya indikator persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan disebabkan cukup tingginya standar kelulusan yaitu antara skor 85,0 – 92,4. Selain itu, dengan adanya diklatpim pola baru juga menimbulkan ketidaksiapan peserta terkait waktu pelaksanaan (on-off) dan perubahan pola pembelajaran (adanya kewajiban menyusun proyek perubahan).

Belum tercapainya indikator persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan disebabkan kelulusan jenjang S2 hanya sebesar 70% dari batas maksimal masa studi selama 2 tahun. Akibatnya ketika diakumulasikan dengan kelulusan jenjang S1 maka menjadikan target tidak tercapai.

Kemudian terkait belum tercapainya target kinerja persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar lebih disebabkan karena terjadinya kelebihan peserta per kelasnya, karena penyelenggara tidak mampu menolak peserta yang dikirim oleh instansi stakeholders. Terakhir terkait dengan indikator kesiapan penerapan e-government, karena pada waktu penilaian PeGI sejumlah perubahan yang telah dilakukan belum ter-record dalam penilaian.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama LAN dalam kurun waktu 2010-2014 dirangkum dalam tabel berikut. IKU yang diperbandingkan dari tahun ke tahun, hanya untuk IKU yang masih dipertahankan pada tahun 2014. Terdapat sejumlah IKU yang baru digunakan pada tahun 2014 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama LAN diindikasikan mengalami perbaikan atau mampu mempertahankan kinerjanya.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama LAN (2010-2014)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders	100	100	100	100	100
2	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	9	22	40	-	-
3	Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar	100%	100%	73,68%	87,18%	78,82%
4	Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan	30,96%	39,65%	52,44%	46,1%	55,65%
5	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi	100	100	100	100	100
7	Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi	32	55	55	65	43
8	Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun	50	83,85	73,5	70,34	79,21%
9	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Skor Evaluasi SAKIP LAN	CC	CC	B	B	B

Indikator Persentase policy paper/policy brief yang dihasilkan dari kajian/ telaah kebijakan, Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, Jumlah produk inovasi administrasi Negara yang dihasilkan, Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang professional, Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim, Persentase fungsional analis kebijakan yang terseleksi, Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan, Tingkat disiplin pegawai dan Indeks kesiapan Percepatan e-government, merupakan indikator merupakan indikator yang baru dalam penetapan kinerja LAN 2014. Penambahan IKU ini terkait perubahan tugas fungsi LAN dan juga untuk merespon kebutuhan untuk memantau capaian sasaran kinerja. Disamping IKU yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 2014, disampaikan pula indikator lain yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Pengukuran

Indeks Reformasi Birokrasi baru dilaksanakan tahun 2014 oleh Kemenpan dan RB. Indikator ini menilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di berbagai instansi pemerintah. Uraian selanjutnya memaparkan analisa capaian kinerja masing-masing IKU dan indikator lainnya.

1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran
Strategi
01

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan

IKU 1.1

Persentase Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders	100%	100%	100%



Sebuah hasil kajian/penelitian tidak akan memberikan manfaat apa pun kepada stakeholders-nya apabila belum didiseminasikan kepada mereka. Diseminasi hasil kajian merupakan salah satu tahapan yang penting dalam rangka menyebarluaskan hasil kajian kebijakan kepada *stakeholders* LAN. Diseminasi juga sebagai salah satu cara untuk mengetahui kemanfaatan dari setiap kajian yang dilakukan oleh LAN dan mendapatkan *feedback* terkait dengan hasil kajian yang dilakukan. Diseminasi hasil kajian dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui ekspose hasil kajian, mengunggah hasil kajian melalui website LAN maupun website yang dimiliki PKP2A LAN I, II, III dan IV serta publikasi langsung kepada *stakeholders* melalui pengiriman via pos serta melalui pemberian langsung kepada *stakeholders* yang berkunjung ke LAN. *Stakeholders* yang menjadi target diseminasi hasil kajian LAN selama ini diantaranya DPR, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Secara umum, presentase hasil kajian LAN tahun 2014 yang disebarluaskan kepada stakeholder tercapai sesuai target yang ditetapkan. Rincian untuk unit-unit yang melaksanakan kajian kebijakan adalah sebagai berikut:

Hasil Kajian Kebijakan LAN yang Didesiminasikan Kepada Stakeholders

No.	Unit Kerja	Target Jumlah Hasil Kajian Yang Disebarluaskan dan Judulnya	Mekanisme Penyebarluasan Hasil Kajian	Realiasi Jumlah Hasil Kajian Yang disebarluaskan
1.	Pusat Kajian Reformasi Birokrasi	2 (dua) Kajian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Model RB di Indonesia ▪ Kajian Strategi RB Sektor Pendidikan 	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100 %
2.	Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara	1 (satu) Kajian Kajian Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100%
3.	Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1 (satu) Kajian Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100 %
4.	PKP2A I LAN Bandung	2 (dua) Kajian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC): Kasus pada Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit ▪ Kajian Penyusunan Buku/ Database Aparatur Tahap III 	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100%



No.	Unit Kerja	Target Jumlah Hasil Kajian Yang Disebarluaskan dan Judulnya	Mekanisme Penyebarluasan Hasil Kajian	Realiasi Jumlah Hasil Kajian Yang disebarluaskan
5.	PKP2A II LAN Makassar	4 (empat) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) ▪ Kajian Model Reformasi Birokrasi (Fokus Sulawesi Selatan) ▪ Kajian Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah ▪ Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100%
6.	PKP2A III LAN Samarinda	2 (dua) Kajian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Model Reformasi Birokrasi di Kalimantan ▪ Kajian Penataan Kelembagaan di Provinsi Kalimantan Utara 	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100%
7.	PKP2A IV LAN Banda Aceh	1 (satu) Kajian Kajian Perbaikan Pelayanan Publik di Era Reformasi Birokrasi di Daerah	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ekspose Hasil Kajian • Website LAN • Melalui Pos • Diberikan secara langsung 	100 %
Jumlah		13 (tiga belas) Kajian		



Dengan adanya restrukturisasi organisasi LAN pada tahun 2014, terdapat implikasi perubahan jumlah dan nomenklatur unit kajian, maka dalam hal ini belum dapat diperbandingkan realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa tahun.

Namun untuk unit kajian yang berada di PKP2A LAN, perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun 2012 s.d 2014 sebagaimana dibawah ini.

Perbandingan Persentase hasil kajian PKP2A LAN yang di desiminasikan kepada stakeholder

Sasaran Strategis	IKU	Target (%)	Realisasi (%)		
			2012	2013	2014
Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan	Persentase hasil kajian yang di desiminasikan kepada stakeholders	100	100	100	100

Pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan kajian di LAN tahun 2014 sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik hambatan teknis maupun administratif, diantaranya adalah :

- Adanya perubahan kebijakan di bidang keuangan, seperti adanya kebijakan optimalisasi penganggaran, terutama terhadap pos-pos yang terkait dengan perjalanan dinas serta terjadinya beberapa kali revisi terhadap DIPA LAN.
- Belum meratanya sebaran tenaga fungsional peneliti di tiap pusat kajian.

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran tentunya tidak dapat dinafikan.

Dengan jumlah tenaga fungsional peneliti yang relatif kurang serta adanya kebijakan optimalisasi anggaran sedikit banyak berimplikasi terhadap jalannya kegiatan kajian. Namun dengan mengsinergikan dan mengefisienkan penggunaan segenap sumber daya, kualitas hasil kajian tidak menjadi menurun.

Pencapaian kinerja LAN tentunya tidak terlepas dari keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan yang dilakukan. Dibidang kajian, setidaknya LAN memiliki program/kegiatan yang dapat menjadi unggulan guna meningkatkan kinerja LAN,

Dengan adanya kajian model reformasi birokrasi, diharapkan akan menjadi model gerakan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

diantaranya adalah kajian model reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang menetapkan target pemerintahan Indonesia sebagai *world class government* pada tahun 2025. Dengan adanya kajian model reformasi birokrasi, diharapkan akan menjadi model gerakan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

IKU 1.2

Persentase Policy Paper/Policy Brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Policy Paper/Policy Brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan	100%	100%	100%

Policy brief adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Sebuah *policy brief* berfokus langsung pada penyediaan sebuah argumen untuk pengadopsian sebuah alternatif tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif yang dipilih, selanjutnya berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Dalam dokumen ini terdapat dua terminologi yaitu *policy paper (pp)* dan *policy brief (pb)*. Pada praktiknya terdapat pusat kajian yang menyusun kedua output tersebut, namun ada pula yang hanya menyusun salah satu output, sehingga dalam hal ini apabila pusat telah menyusun salah satu dari kedua output tersebut atau kedua-duanya maka dapat dikatakan telah mencapai kinerja yang telah direncanakan.

IKU persentase policy paper/policy brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan salah satunya diukur dari persentase policy paper/policy brief yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan. Pada tahun 2014, capaian policy paper/policy brief yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Judul	Target	Realisasi	%
1.	Pusat Kajian Kinerja Sistem dan Hukum Administrasi Negara	Membangun Sinergi Perencanaan dan Penganggaran	1 pp/pb	1 pp/pb	100%

2.	Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kesiapan Pemda dalam Menghadapi ASEAN Community 2015	1 pp/pb	1 pp/pb	100%
3.	Pusat Kajian Reformasi Administrasi	a. Evaluasi Model Reformasi Birokrasi di Indonesia (Pol. paper) b. Agenda Reformasi Birokrasi	2 pp/pb	2 pp/pb	100%
4.	Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2 pp/pb	1 pp/pb	100%*)
5.	Pusat Inovasi Pelayanan Publik	Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Permasalahan dan Rekomendasi	--	1 pp/pb	100%*)
6.	PKP2A I Bandung	Kesiapan Pemda dalam Menghadapi ASEAN Community 2015	1 pp/pb	1 pp/pb	100%
7.	PKP2A II Makassar	Kesiapan Pemda dalam Menghadapi ASEAN Community 2015	1 pp/pb	1 pp/pb	100%
8.	PKP2A III Samarinda	Membangun Daerah Melalui “Blusukan” Via SMS	1 pp/pb	1 pp/pb	100%
9.	PKP2A IV Aceh	Kesiapan Pemda dalam Menghadapi ASEAN Community 2015	1 pp/pb	1 pp/pb	100%
Jumlah			11	11	100%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Keterangan: pp/pb = policy paper/policy brief

**) untuk pp/pb di kedeputan inovasi dianggarkan di Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA (PIKSA) sehingga untuk target dan realisasi diakumulasikan di Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh PIKSA dan Pusat Inovasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target *policy paper/policy brief* yang dihasilkan sebanyak 11 (sebelas) buah. Pada awalnya target *policy paper/policy brief* sebanyak 14 (empat belas) buah, namun karena terjadinya pemotongan (: efisiensi) anggaran maka target tersebut direvisi menjadi hanya 11 (sebelas) *policy paper/policy brief*, dan target dimaksud tercapai seluruhnya (100%). *Policy paper/policy brief* disusun berdasarkan kajian/ penelitian/telaah kebijakan dan kajian isu-isu strategis.



Policy Brief di Kedeputian Kajian Kebijakan (1)

Policy paper yang disusun Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan tindak lanjut dari kajian dengan judul yang sama. Latar belakang (*background*) munculnya *policy brief* ini berawal dari fakta terjadinya pemisahan antara lembaga perencanaan dan penganggaran program pembangunan pasca reformasi justru menimbulkan fragmentasi pemerintahan karena fungsi penyusunan program masih tetap berada di Bappenas, sedangkan fungsi penganggaran berada di Kementerian Keuangan. Tidak sinerginya perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan pertemuan tiga pihak sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Kondisi yang terjadi antara lain : 1) Buruknya koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja, 2) Inkonsistensinya kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan RKA-KL, dan 3) Rendahnya komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.

Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rekomendasi kebijakan (alternatif kebijakan) yang meliputi perspektif jangka pendek (perbaikan ketatalaksanaan) dan perspektif jangka panjang (perbaikan kelembagaan). Dalam perspektif ketatalaksanaan diperlukan pembenahan terhadap proses dan prosedur perencanaan program kegiatan dan penganggaran di Indonesia. Tatalaksana perencanaan dan penganggaran ke depan dilakukan dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut.

- a. Presiden menetapkan Visi, misi, program kerja,
- b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menerjemahkan pencapaian visi, misi dan program presiden dalam RPJM disertai target output dan outcome yang harus dicapai oleh kementerian/lembaga. Target tersebut kemudian diinput dalam sebuah sistem aplikasi perencanaan program/kegiatan. Selain itu, disusun pula pedoman tentang bagaimana proses penyusunan usulan program/kegiatan yang harus dilakukan oleh K/L. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyusun estimasi rencana penerimaan negara untuk 5 (lima) tahun ke depan
- c. Setiap tahun, Kementerian/Lembaga menyusun usulan program/kegiatan berdasar RPJM beserta estimasi rencana anggaran yang diperlukan. Usulan tersebut disampaikan melalui sebuah sistem aplikasi perencanaan program/kegiatan pembangunan
- d. Setiap Tahun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengevaluasi kinerja program/kegiatan tahun lalu dan usulan program/kegiatan tahunan yang disampaikan melalui sistem aplikasi, serta menetapkan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai (RKT). Sementara Kementerian Keuangan mengevaluasi kinerja efisiensi anggaran, dan Menetapkan sumber pembiayaan pembangunan.
- e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun dokumen RKP, sementara Kementerian Keuangan menyusun dokumen RAPBN
- f. Presiden menetapkan dokumen nota keuangan untuk disampaikan ke DPR.

Secara kelembagaan, fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi atas rencana program kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Bappenas yang akan ditempatkan **di Kantor Kepresidenan, dengan nomenklatur Sekretariat Perencanaan Program dan Anggaran**. Sekretariat Perencanaan Program dan Anggaran pada Kantor Kepresidenan tersebut, terbentuk melalui 3 (tiga) opsi sebagai berikut

- a. Opsi 1 (Progresif), Bappenas dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran **merger** menjadi “Sekretariat Perencanaan Program dan Anggaran” pada Kantor Kepresidenan (disingkat Kantor Set P2A Kanpres)
- b. Opsi 2 (moderat) Bappenas menjadi “Sekretariat Perencanaan Program dan Anggaran” pada Kantor Kepresidenan (Set P2A Kanpres), dan Ditjen Anggaran tetap tapi fungsi/ kewenangan pengambilan keputusan pengalokasian anggaran pindah ke Kantor Set P2A Kanpres
- c. Opsi 3 (konservatif) Bappenas tetap tapi fungsi/ kewenangan pengambilan keputusan penetapan prioritas program/ kegiatan pindah ke Kantor Set P2A Kanpres, dan Ditjen Anggaran tetap tapi fungsi/ kewenangan pengambilan keputusan pengalokasian anggaran pindah ke Kantor Set P2A Kanpres.

Selanjutnya, *policy brief* mengenai Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*. Naskah *policy brief* ini sangat relevan dengan perkembangan lingkungan strategis mengingat pada tahun 2015 kebijakan yang disepakati oleh para pemimpin negara anggota ASEAN ini sudah resmi dilaksanakan, dan pemerintah pusat dan daerah sebagai *stakeholder* utama dalam kebijakan ini perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kajian dengan tema sejenis juga dilakukan di 3 (tiga) PKP2A LAN lainnya yakni di PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Samarinda dan PKP2A IV LAN Aceh.

Berbagai aspek menyangkut harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, perijinan, kesiapan sumber daya manusia aparatur, dan masyarakat di daerah, perlu dilakukan tata kelola dan diselaraskan dengan aspek-aspek dan aturan main terkait pelaksanaan *ASEAN Economic Community 2015* ini. Kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* yang segera berlaku Desember 2015.

Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan pun bervariasi sesuai dengan pembatasan masalah dan lingkup wilayah masing-masing pusat kajian dan PKP2A LAN. Khusus untuk di PKDOD misalnya, rekomendasi yang diberikan terkait kebijakan kelapa sawit di Indonesia (secara nasional) dalam menghadapi *ASEAN Community 2015* dimaksud.

Sesuai Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB), tahun 2014 merupakan akhir dari tahap pertama pelaksanaan kebijakan RB. Pemerintah perlu meninjau kembali pendekatan dan strategi pelaksanaan kebijakan RB. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan dalam mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan reformasi otentik : spesifik, fokus dan berorientasi kepada *output*
2. Penguatan *implementing structure* kebijakan RB
3. Penyesuaian pembagian tugas tingkat instansional dan nasional
 - a. Tanggung jawab tingkat nasional,



*Policy Paper/Policy Brief di
Kedeputan Kajian Kebijakan (2)*

meliputi: Penataan regulasi, Penataan kelembagaan, Cetak biru e-government secara nasional, Pengembangan single ID Number, dan Penyiapan kader kepemimpinan dan agen perubahan

- b. Tanggung jawab tingkat instansional
4. Penyesuaian instrumen pelaksanaan kebijakan RB
 - a. Pedoman dokumen pengusulan
 - b. Penyusunan kontrak perubahan sebagai acuan manajemen kinerja instansi
 - c. Kontrak perubahan dan tunjangan kinerja
 - d. Rencana pengembangan inovasi administrasi
 - e. Delapan area perubahan sebagai menu a la carte (pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan instansi pelaksana RB)
 - f. Instrumen penilaian sederhana dan stakeholder driven.



Policy Brief di Kedeputan Inovasi

Salah satu isu yang mengemuka dalam UU ASN adalah munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN. Dalam UU ASN (UU No. 5 Tahun 2014) khususnya di Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya di butir 2 dijelaskan bahwa Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Inilah hal penting yang menjadi fokus dalam paper ini, yaitu bahwa pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dengan dimunculkannya PPPK dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak menimbulkan pertanyaan tentang siapa PPPK sebagaimana dimaksud dalam UU

ASN. Beberapa pendapat misalnya menyatakan bahwa PPPK adalah pegawai honorer, ada yang menyatakan bahwa PPPK adalah pejabat-pejabat fungsional tertentu, dan juga yang menyatakan bahwa PPPK adalah pegawai swasta yang membantu tugas pemerintahan (*outsourcing*).

Dari ulasan secara yuridis, empiris dan analisis yang dilakukan oleh Tim PIKSA dapat diberikan beberapa kesimpulan berikut ini :

- a. Sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PPPK dapat mengisi semua jabatan ASN, kecuali untuk jabatan JPT jenjang pratama (karena tidak diamanatkan dalam UU ASN).
- b. Jabatan-jabatan dalam JPT utama dan JPT madya yang dapat diisi oleh PPPK pada dasarnya terbatas dan harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan kata lain pengisian JPT dari PPPK adalah hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek (misalnya keterbatasan PNS, kebutuhan percepatan pelayanan dan sebagainya).
- c. Jabatan-jabatan dalam JA dan JF dapat diisi semuanya oleh PPPK.

Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi PPPK pada dasarnya terbatas (untuk JPT dan JA yang mesti ditetapkan dengan Keppres dan Perpres) tetapi untuk JF tidak terbatas. Tujuan utama yang hendak dicapai dengan pengisian jabatan-jabatan ASN oleh PPPK adalah untuk melakukan percepatan atau akselerasi dalam pemberian pelayanan publik. Dengan masuknya PPPK dengan kompetensi yang sudah terbangun maka akan menghemat biaya dan tenaga. Selain itu pengelolaan manajemen PNS yang cenderung kaku dapat diubah dengan model yang lebih fleksibel dan adaptif dengan masuknya PPPK.

Selain itu dengan masuknya PPPK dalam ASN akan menimbulkan suasana kompetisi yang sehat antara PNS dan PPPK untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan kontribusi pada organisasi. Dengan demikian terwujudnya pegawai yang profesional diharapkan dapat direalisasikan secara lebih cepat.

Policybrieflainnyayangmenarikuntukdibahasadalahmengenai programjaminan kesehatan nasional (JKN), dimana hal tersebut dianggap sebagai salah satu inovasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana penyelenggaraan SJSN ini menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib (*mandatory*). Sebagai sebuah kebijakan pemerintah, program SJSN ini akan menggantikan secara bertahap jaminan sosial yang telah ada sebelumnya seperti Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Asuransi Sosial Angkatan

Untuk mewujudkan SJSN ini, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Dengan adanya program SJSN ini, maka seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau pensiun.

Untuk mewujudkan SJSN ini, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana BPJS adalah

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Didalam UU No. 24 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua JKN tersebut, maka jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Sejak diberlakukan Januari 2014 yang lalu, implementasi kebijakan JKN sarat dengan berbagai permasalahan, diantaranya **pertama**, masih belum meratanya sosialisasi terutama untuk wilayah-wilayah terpencil. **Kedua**, komitmen antara manajemen dan penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat masih berbeda sehingga memunculkan perbedaan komitmen terkait mekanisme JKN. **Ketiga**, masih banyak rumah sakit swasta yang belum bergabung pada BPJS kesehatan terutama di daerah. **Keempat**, kurangnya pelayanan kesehatan mengakibatkan banyak peserta yang mengantri dan penumpukan tersebut diakibatkan kurang optimalnya sistem rujukan, dan **Kelima**, masih adanya kesenjangan kapasitas antar daerah (kesiapan infrastruktur, database, anggaran dan SDM). Kesenjangan yang terjadi sesama wilayah akan berdampak pada pelaksanaan program JKN kedepan.

Tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan JKN adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan yang diakibatkan melambatnya tingkat penurunan kemiskinan, dimana penurunan kemiskinan tahun 2012-2013 ini adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. (Kompas, Rabu, 24 September 2014). Dampak dari penurunan tingkat kemiskinan tersebut, sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin yang disebabkan oleh guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana dan kehilangan pekerjaan berpotensi membuat kelompok penduduk kembali jatuh miskin. Oleh karena itu, keberadaan program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu elemen penting didalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan tantangan dari BPJS sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan, jatuh sakit.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, berikut disampaikan rekomendasi dari permasalahan tersebut :

- a. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder* (Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemenkominfo, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemerintah Daerah, Klinik serta Dokter Praktik) dalam melaksanakan sosialisasi program JKN kepada masyarakat melalui *sharing* sumber daya, sarana dan prasarana, perencanaan, penganggaran, dan substansi sosialisasi serta penguatan fungsi dan peran masing-masing *stakeholder* dalam melaksanakan sosialisasi JKN secara umum dan khusus. Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan harus menjadi motor dalam mensinergikan peran dari masing-masing *stakeholder* tersebut, sehingga penyampaian program JKN kepada masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan peran masing-masing *stakeholder*.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk melakukan sosialisasi melalui koordinasi antar *stakeholder* dengan pola *regrouping* serta melakukan sosialisasi secara berjenjang dengan membentuk fasilitator. Sebagai regulator, Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam menyiapkan substansi sosialisasi. BPJS kesehatan sebagai operator memiliki peran dalam menyiapkan SDM yang berkualitas sebagai fasilitator dalam rangka *transfer knowledge* kepada *stakeholder* lain (Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter Praktek dan LSM)
- c. Penggunaan media yang dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air. Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat menyusun regulasi yang mengatur tentang keharusan media massa baik cetak maupun elektronik untuk melakukan sosialisasi program JKN, sehingga penyebaran informasi terkait program JKN dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air hingga daerah terpencil.
- d. Penyesuaian materi sosialisasi dengan jenis media dan kelompok sasaran serta menciptakan brand tentang sosialisasi yang mudah dipahami. Oleh karena itu BPJS Kesehatan harus membuat terobosan serta inovasi dalam menciptakan

brand yang mudah diingat oleh masyarakat terkait dengan sosialisasi program JKN.

- e. BPJS Kesehatan harus dapat menciptakan pola-pola sosialisasi yang lebih inovatif dan lebih mengena seperti menciptakan ikon, duta, dan maskot sosialisasi JKN, memanfaatkan forum-forum masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta pelibatan Perguruan Tinggi, RT/RW, LSM Kesehatan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- f. Sebagai operator dalam penyelenggaraan program JKN, kiranya BPJS Kesehatan perlu memberikan peran yang lebih besar kepada Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik serta Dokter Praktek sebagai agen sosialisasi langsung kepada masyarakat (pasien dan keluarganya).
- g. Selama ini terkesan adanya pemahaman yang berbeda antar stakeholder (Kemenkes, BPJS, RS dan lain-lain) tentang program JKN ini. Oleh karena itu perlu adanya internalisasi disetiap stakeholder untuk menyamakan pemahaman tentang program JKN.

Policy Brief di PKP2A III
LAN Samarinda

POLICY BRIEF



PKP2A III LAN



Membangun Daerah Melalui “Blusukan” via SMS

Rustan A. dan Fani Heru Wismono
PKP2A III - Lembaga Administrasi Negara

Salah satu *policy brief* terkait kebijakan reformasi birokrasi disusun oleh PKP2A III LAN Samarinda, yang berjudul ***Membangun Daerah Melalui “Blusukan” Via SMS***. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah khususnya di Kalimantan menjadi salah satu pusat perhatian LAN selain RB di level K/L. Dalam kaitan ini, Kota Pontianak dan Kabupaten Tanah Bumbu dipilih sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan keberhasilan kedua daerah ini dalam melaksanakan pembaharuan kinerja birokrasi yang dinilai layak untuk dijadikan referensi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Dari kajian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pola umum pelaksanaan reformasi birokrasi di Kalimantan adalah model Kekuasaan-Koersif menuju model Normatif-Reedukatif.

Faktor kepemimpinan yang kuat dan reformis; interaksi publik yang intens; manajemen mind-set aparatur; serta kejelasan visi dan misi, menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Namun, juga teridentifikasi tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu: penyiapan pemimpin yang reformis; penyiapan visi dan misi peningkatan kualitas pelayanan publik; penyiapan *energizing bureaucracy*; penyiapan strategi perubahan mind-set aparatur; penyiapan wadah interaksi dengan publik; serta penyiapan program-program perubahan.

Sasaran
Strategi
02

Terwujudnya pembaharuan administrasi negara

IKU 2.1

Terwujudnya pembaharuan administrasi negara

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan	2 model	3 model	150%

Inovasi Administrasi Negara diartikan sebagai ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam melakukan pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan proses administrasi Negara. Produk Inovasi Administrasi Negara dapat berupa model inovasi administrasi negara, prototype, desain, arsitektur, karya/konsep inovasi, sistem, rancang bangun, dan lain sebagainya. Inovasi dalam lingkup administrasi negara, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1). inovasi proses; (2). inovasi metode; (3). inovasi produk; (4). inovasi konseptual; (5). inovasi teknologi; (6). inovasi struktur organisasi; (7). inovasi hubungan; dan (8). inovasi sumber daya manusia.

Terdapat beberapa tahapan dalam inovasi administrasi negara, meliputi: (1). Tahap Inisiasi, pada tahap ini dilakukan analisis gap dan identifikasi kebutuhan inovasi serta melakukan *stock taking best practices (benchmarking)*; (2). Tahap Inkubasi, yaitu tahap pematangan inisiatif inovasi melalui pelatihan/pendampingan; (3). Tahap Diseminasi, yaitu tahap penuangan praktek-praktek inovasi melalui publikasi dan dialog inovasi; (4). Tahap Adopsi/Replikasi/Modifikasi, yaitu tahap pemilihan area inovasi dan penetapan kerangka kerja inovasi (metode, rencana capaian, dll); dan (5). Tahap Aktualisasi, yaitu tahap pelaksanaan inovasi, monev/impact assessment, dan lesson learned. Pada tahun 2014 ini kegiatan LAN lebih banyak berupa inovasi administrasi negara yang diarahkan untuk meningkatkan *awareness* terhadap inovasi administrasi negara dan pengembangan konsep-konsep maupun panduan yang mendorong berkembangnya inovasi administrasi negara.

Indikator Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan mengukur sejauh mana LAN menghasilkan produk inovasi Administrasi Negara. Indikator ini diukur dari banyaknya model/produk inovasi Administrasi Negara yang dihasilkan oleh LAN. Pada tahun 2014, LAN melalui ke deputian bidang inovasi Administrasi Negara menargetkan sebanyak 2 (dua) model/produk inovasi, yakni: Arsitektur Kabinet 2014-2019 serta Portal Inovasi Administrasi Negara & Direktori Inovasi Administrasi Negara (e-directory). Kemudian dalam perkembangannya dihasilkan 3 (tiga) model/produk inovasi dari target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 150% melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, terdapat 3 (tiga) model/produk inovasi yang dilaksanakan LAN yaitu: (1). Arsitektur Kabinet 2014-2019, (2). Portal Inovasi Administrasi Negara & Direktori Inovasi Administrasi Negara (e-directory), dan (3). Buku Handbook Inovasi Administrasi Negara. Arsitektur kabinet 2014-2019 merupakan hasil inovasi di bidang kelembagaan/struktur organisasi berupa model arsitektur kabinet 2014-2019, sedangkan Portal Inovasi Administrasi Negara dan database direktori inovasi (e-direktory) merupakan hasil inovasi teknologi, berupa portal informasi berbasis web dan database inovasi berbasis web. Buku handbook Inovasi Administrasi Negara juga merupakan produk inovasi dalam bentuk buku referensi dan inspirasi dalam praktek inovasi terpilih.



Untuk membentuk struktur kabinet yang lebih ramping, efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Opsi yang ditawarkan LAN ini menjadi bahan pertimbangan bagi calon presiden terpilih dalam merancang arsitektur kabinetnya.

Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja. Masing-masing indicator dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 3.1

Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah Lembaga terakreditasi	diklat yang	9 Lembaga Diklat	Kegiatan ditiadakan	n.a

Sehubungan dengan telah diterapkannya diklat kepemimpinan pola baru yang berorientasi pada pembentukan pemimpin perubahan, maka berimplikasi terhadap persyaratan para penyelenggara diklat baik di level kementerian/lembaga maupun provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga akreditasi terhadap lembaga penyelenggara diklat kepemimpinan belum dapat dilakukan karena instrument akreditasi juga harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan pola baru. Disamping itu adanya kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran instansi pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 dan perubahannya dengan Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tertanggal 14 Juni 2014, tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2014, maka salah satu kegiatan yang masuk kategori terkena penghematan adalah kegiatan Akreditasi Lembaga Diklat. Oleh karena itu capaian indikator kinerja untuk sasaran ini belum tercapai karena tidak dilaksanakan.

IKU 3.2

Ketersediaan Fasilitator Diklat Pim yang Profesional

Pembaharuan sistem diklat Kepemimpinan juga mempersyaratkan tersedianya SDM kediklatan yang memenuhi kompetensi tertentu. Karena jika kompetensi SDM kediklatan tidak memenuhi syarat maka tujuan dari diklatpim untuk menciptakan pemimpin perubahan tidak akan tercapai dengan optimal. Salah satu SDM kediklatan yang punya kontribusi signifikan adalah widyaiswara/fasilitator. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menyamakan persepsi para widyaiswara/fasilitator diklat kepemimpinan maka Lembaga Administrasi Negara mengadakan Training of Facilitator (ToF) sebagai persyaratan bagi widyaiswara/fasilitator untuk mengajar pada mata diklat.

ToF diadakan secara bertahap untuk membantu widyaiswara/fasilitator dalam memahami tahapan dalam Diklat Kepemimpinan yang terdiri atas 5 tahap dan bersifat on /off. Karena prinsip dalam diklat kepemimpinan ini adalah *experientials learning* maka pemahaman widyaiswara/fasilitator menjadi sangat penting dalam melakukan delivery materi agar sesuai dengan misi diklat kepemimpinan yaitu menciptakan pemimpin perubahan yang inovatif dan kreatif.

Diklat ToF dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, PKP2A I, PKP2A II dan PKP2A III, dengan rincian sebagai berikut:

Ketersediaan Fasilitator Diklat Pim yang Hasil Diklat ToF LAN 2014

	Target	Realisasi	Penyelenggara
TOF Diklatpim Tk. III dan IV	60 Orang	64 Orang	Makassar
TOF Diklatpim Tk. III dan IV	40 Orang	40 Orang	Samarinda
TOF Diklatpim Tk. III dan IV	120 Orang	120 Orang	TF
TOF Diklatpim Tk. III dan IV	60 Orang	57 Orang	Jatinangor
TOF Diklatpim Tk. III dan IV	60 Orang	47 Orang	Aceh
JUMLAH	340 Orang	328 Orang	

Dengan target 340 orang, terpenuhi Diklat untuk 328 orang, sehingga ketersediaan fasilitator Diklatpim adalah 96,47%. Jadi capaian indikator kinerja 96,47% dari target 90%, yaitu **107,19%**.

Selain mengikutsertakan dalam kegiatan ToF, para widyaiswara juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya melalui seminar dan diskusi yang diadakan oleh LAN maupun mengikuti forum-forum ilmiah yang diadakan oleh instansi lain. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan widyaiswara.

IKU 3.3

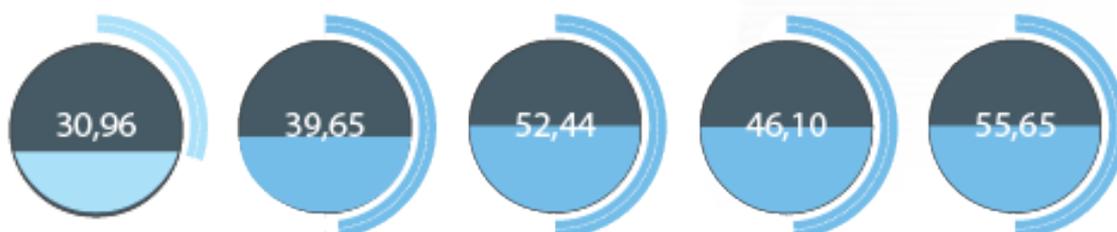
Persentase Lulusan Diklatpim dengan Predikat Minimal Memuaskan

Tingkat kelulusan peserta diklat merupakan hasil penilaian dari kualitas proyek perubahan disamping mempertimbangkan sikap dan perilaku. Penilaian ini diharapkan dapat mencerminkan kualitas peserta diklat yang bersangkutan. Kualifikasi kelulusan peserta memuaskan adalah peserta dengan nilai 85,0 – 92,4. Rincian hasil lulusan peserta diklat dengan predikat minimal memuaskan dirangkum dalam tabel berikut.

Persentase Lulusan Diklatpim dengan Predikat Minimal Memuaskan

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	KAN	Jatinangor	Makassar	Samarinda	Total
Diklatpim Tk. I	30	27				27
Diklatpim Tk. II	508	140	100	36		276
Diklatpim Tk. III	198	65	25	22		112
Diklatpim Tk. IV	211	48	16	19	29	112
Jumlah	947	280	141	77	29	527

Prosentase Lulusan Diklat Aparatur Dengan Predikat Minimal Memuaskan



Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa Nilai kelulusan peserta dengan minimal memuaskan adalah 55,65% (527 dari 947). Jadi capaian indikator kinerja 55,65% dari target 60%, yaitu **92,75%**.

IKU 3.4

Persentase Pemimpin Perubahan yang Dihasilkan dari Diklatpim

Pemimpin perubahan disini adalah keberhasilan peserta dalam mengimplementasikan proyek perubahannya selama kurang lebih 2 bulan masa off campus di instansinya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari kelulusan peserta Diklatpim. Peserta yang lulus dalam Diklatpim pola Baru dikategorikan sebagai pemimpin perubahan. Rincian pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim di LAN dirangkum dalam tabel berikut:



Pemimpin Perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim di LAN

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	LULUS				TOTAL LULUS
		KAN	Jatinangor	Makassar	Samarinda	
Diklatpim Tk. I	30	30				30
Diklatpim Tk. II	508	266	107	111		484
Diklatpim Tk. III	198	78	28	86		192
Diklatpim Tk. IV	211	76	30	62	35	203
Jumlah	947					909

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim adalah 95,99% (909 dari 947). Dengan target 80%, maka capaian indicator kinerja adalah **119,99%**.

IKU 3.5

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar dengan target 100%

- 01** Penyelenggaraan Diklat sesuai standar dilihat dari ketentuan Peraturan Kepala LAN berkenaan dengan jumlah peserta pada Diklat terkait. LAN telah menetapkan standar-standar penyelenggaraan diklat meliputi :
- 02** Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I
- 03** Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
- 04** Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

05 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

06 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

07 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

08 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan diklat Tahun 2014 yang sesuai standar adalah sebagai berikut.

Penyelenggaraan Diklat Tahun 2014 yang Sesuai Standar

	Diklat- pim	Teknis & fungsional	Pra- jabatan	Total Diklat	Tidak Standar	Standar
PKP2A I	4	11	2	17	5	12
PKP2A II	7	5	0	12	0	12
PKP2A III	1	4	8	13	1	12
PKP2A IV	0	1	0	1	1	0
KAN/TF/P3D/Balai Bahasa	10	18	2	30	9	21

Berdasarkan table di atas tampak bahwa penyelenggaraan diklat yang sesuai standar adalah 57 dari 73 penyelenggaraan diklat atau 78,82%. Dengan target 100%, maka capaian indikator kinerja adalah 78,82%.

IKU 3.6

Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Diklat Aparatur dengan Target Baik

Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur diukur melalui survey melalui penyebaran kuesioner evaluasi penyelenggaraan diklat kepada peserta diklat langsung sebagai pengguna diklat dan dilaksanakan setiap akhir masing-masing mata diklat. Instrumen yang digunakan diantaranya mengukur kepuasan peserta dari aspek substansi yang meliputi kualitas tenaga pengajar, bahan ajar, dan penjadwalan sedangkan dari aspek teknis meliputi akomodasi, konsumsi dan pelayanan kediklatan lainnya.

Hasil evaluasi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

Penyelenggara*	Jumlah Diklat	Skor Rata-rata	Total Skor
PKP2A I	17	4	68
PKP2A II	12	5	60
PKP2A III	13	5	65
PKP2A IV	1	4	4
TF	11	4	44
KAN	10	4	40
Jumlah	64		281

*Keterangan : Tidak termasuk diklat yang diselenggarakan oleh P3D dan Balai Bahasa.

Berdasarkan table di atas tampak bahwa rata-rata tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur adalah 4,39 (Baik). Dengan target Baik, maka capaian indikator kinerja adalah **100%**.

Sasaran
Strategi
04

Terselenggaranya pembinaan diklat, widyaiswara, dan analis kebijakan yang berkualitas

IKU 4.1

Persentase Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Diklat, Widyaiswara, dan Analis Kebijakan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analis kebijakan	100%	103%	103%

Persentase kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analis kebijakan dihitung dari realisasi jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analis kebijakan dibandingkan dengan targetnya. Secara umum untuk indikator ini target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dari 66 Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Diklat/Widyaiswara/ Analis Kebijakan yang ditargetkan, dihasilkan tambahan 2 kebijakan pembinaan analis kebijakan. Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 103%.

Rincian dari kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan diklat, widyaiswara, dan analis kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

01 Jumlah Pedoman/Konsep/Instrumen Pembaharuan Diklat Kepemimpinan
Pembaharuan Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 yaitu dengan adanya perubahan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan Monitoring Evaluasi. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu hanya ada 1 (satu) instrumen yang akan dihasilkan pada tahun 2014 sehingga capaian yang diperoleh yaitu 100%. Instrumen tersebut masih berupa konsep dan belum dirubah menjadi perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara terbaru.

02 Jumlah Pedoman/Konsep/Instrumen Pembaharuan Diklat Prajabatan

Jumlah Modul Diklat Prajabatan yang dihasilkan untuk Golongan I/II yaitu 17 Modul dan untuk Golongan III sebanyak 17 Modul. Adapun target yang ditetapkan yaitu sebanyak 34 Paket, sehingga prosentasenya realisasinya tercapai 100%. Sementara Untuk Kasus Diklat Prajabatan dihasilkan 22 Paket yang merupakan keseluruhan dari target sehingga prosentase capaiannya sebesar 100 %.

Untuk Soal Ujian Diklat Prajabatan sesuai target dihasilkan 22 set, yaitu 11 set untuk golongan I/II dan 11 set untuk Golongan III sehingga capaian prosentasenya yaitu **100 %**.

Untuk pembuatan film Diklat Prajabatan, dilakukan untuk lima mata Diklat. Untuk kelima mata Diklat tersebut dihasilkan 5 (lima) film pendek dan 5 (lima) role model sehingga film yang dihasilkan ada 10 (sepuluh) film. Capaian yang dihasilkan 100% dari target yang telah ditetapkan.

03 Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Widyaiswara

Di bidang pembinaan Widyaiswara, perbandingan target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Paket rancangan kebijakan bidang pembinaan Widyaiswara meliputi:

- a. Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No. 1 dan 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya Rancangan kebijakan yang ditargetkan telah dihasilkan. Revisi telah selesai dilakukan dan saat ini sedang dalam proses pengundangan
- b. Revisi Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya Penyusunan rancangan kebijakan ini dilakukan secara paralel dengan Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN. Penyusunan Rancangan kebijakan yang ditargetkan telah selesai dilakukan dan pengundangan akan dilakukan setelah selesai proses pengundangan Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN

Tahun 2014 ini semula akan diadakan Penyusunan Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi namun kegiatan dibatalkan karena adanya kebijakan pemotongan/efisiensi anggaran. Dengan hasil tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator kinerja ini mencapai 100% walaupun ada satu target kegiatan yang tidak dapat teralisasi namun disebabkan kebijakan nasional yang tidak dapat dihindari Pusat Pembinaan Widyaiswara.

04 Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Analisis Kebijakan

Untuk Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Analisis Kebijakan ditargetkan 2 pedoman (100%) dapat dihasilkan pada tahun 2014. Untuk menindaklanjuti PermenPAN dan RB No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya diperlukan serangkaian kebijakan, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan Analisis Kebijakan yang profesional. Dalam perkembangannya, untuk merespon kebutuhan instrumen pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK), pada tahun 2014 LAN telah menghasilkan 4 produk kebijakan yang berupa:

- a. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No. 16 Tahun 2014 dan No. 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No. 45 Tahun

Dalam perkembangannya, untuk merespon kebutuhan instrumen pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), pada tahun 2014 LAN telah menghasilkan 4 produk kebijakan

2013 Tentang JFAK dan Angka Kreditnya. Peraturan ini dibuat sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang JFAK dan Angka Kreditnya

b. Peraturan Kepala LAN No. 31 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi JFAK. Standar Kompetensi JFAK adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analis Kebijakan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.

c. Peraturan Kepala LAN No. 32 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFAK. Pedoman Penyusunan Formasi JFAK dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada instansi Pusat dan Daerah.

d. Peraturan Kepala LAN No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan Kedalam JFAK Melalui Penyesuaian/Inpassing. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan suatu petunjuk mengenai proses penyesuaian/Inpassing bagi PNS yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan, tetapi belum memperoleh jabatan fungsional dan berkeinginan untuk menjadi Analis Kebijakan.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa capaian IKU Presentase Kebijakan/Pedoman/Konsep/Instrumen Pembinaan Analis Kebijakan dengan target 2 pedoman (100%) dapat dicapai oleh LAN, bahkan melebihi yaitu sebanyak 4 produk kebijakan (200%). Hal ini antara lain terkait dengan kebutuhan kebijakan/instrumen pembinaan JFAK mendesak untuk diterbitkan.

IKU 4.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kewidyaiswaraan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan	Memuaskan	Memuaskan	100%

Terkait dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, dari evaluasi yang telah dilakukan, *stakeholders* menyatakan

kepuasan mereka terhadap layanan administrasi kewidyaiswaraan yang telah diberikan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara. Kepuasan ini ditunjukkan antara lain dengan:

- a. Pada tahun 2014 terdapat 45 permintaan fasilitasi bidang kewidyaiswaraan dari instansi lain yang terdiri 24 fasilitasi di bidang seleksi dan pengembangan, dan 21 fasilitasi di bidang evaluasi dan pemantauan Widyaiswara. Dari beberapa fasilitasi bidang kewidyaiswaraan tersebut, evaluasi yang dilakukan mengindikasikan bahwa stakeholders menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan. Evaluasi dilakukan melalui instrumen kuesioner yang dibagikan kepada peserta kegiatan fasilitasi di bidang seleksi dan pengembangan Widyaiswara maupun fasilitasi di bidang evaluasi dan pemantauan Widyaiswara. Hasil evaluasi kegiatan fasilitasi dinyatakan memuaskan.
- b. Hasil laporan pemantauan melalui pembinaan dan evaluasi Widyaiswara, melalui kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Widyaiswara yang menunjukkan bahwa Widyaiswara menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan. Evaluasi pembinaan Widyaiswara menggunakan instrumen kuesioner yang disebarikan kepada Widyaiswara di lembaga Diklat Pusat maupun Daerah dengan indikasi hasil memuaskan
- c. Prosentase penanganan aduan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan yang mencapai 100%. Pada tahun 2014, terdapat 55 aduan yang masuk ke Pusat Pembinaan Widyaiswara terutama terkait dengan proses evaluasi/penilaian angka kredit Widyaiswara. Aduan yang masuk terutama terkait dengan permintaan klarifikasi atas hasil penilaian angka kredit yang berbeda dengan usulan, dan permohonan koreksi atas kesalahan input yang terjadi dalam proses penilaian angka kredit. Seluruh aduan dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi masukan dalam proses layanan administrasi kewidyaiswaraan.

Secara umum ekspresi kepuasan ditunjukkan dengan apresiasi dari *stakeholders* terhadap semakin cepatnya layanan. Namun, terdapat pula beberapa masukan untuk perbaikan layanan di Pusat Pembinaan Widyaiswara seperti layanan yang belum online dan masih banyaknya kebijakan/materi pembinaan Widyaiswara yang telah out of date sehingga perlu segera di perbaiki.

IKU 4.3

Persentase Fungsional Analisis Kebijakan yang Terseleksi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase fungsional analisis kebijakan yang terseleksi	50% (dari peserta yang mengikuti uji kompetensi)	60% (dari peserta yang mengikuti uji kompetensi)	120%

Terkait IKU Persentase Fungsional Analisis Kebijakan (AK) yang terseleksi, pada tahun 2014 ditargetkan 50% dari peserta yang mengikuti uji kompetensi. Pengukuran dilakukan

dengan membandingkan antara calon analis kebijakan yang lulus seleksi administrasi dengan calon yang direkomendasikan untuk diangkat menjadi analis kebijakan melalui *inpassing*. Hasil penghitungan tersebut tersebut dibandingkan dengan target IKU.



Penyelenggaraan Seleksi Calon Analis Kebijakan Melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing terdiri dari seleksi administrasi dan uji kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk

mengecek kevalidan dan kesesuaian persyaratan administrasi dari calon analis kebijakan. Sedangkan uji kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan analisis dan politis calon analis kebijakan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap karya tulis dan wawancara.

Jumlah calon yang diusulkan untuk mengikuti seleksi pada tahun 2014 sejumlah 99 orang yang berasal dari 36 instansi. Namun sesudah dilakukan seleksi administrasi terdapat 28 orang (11 instansi) yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Sesudah uji kompetensi sebanyak 17 orang (60%) direkomendasikan untuk menjadi AK, 5 orang (20%) tidak hadir pada waktu uji kompetensi, dan sebanyak 5 orang (20%) tidak direkomendasikan sebagai analis kebijakan.

Informasi di atas memperlihatkan bahwa target sebesar 50% yang direncanakan dapat dicapai bahkan melebihi, yakni 60%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian untuk IKU Presentasi Fungsional AK yang terseleksi sebesar 120%.

Sasaran Strategi
05

Profesionalisme pelaksanaan fasilitas

IKU 5.1

Persentase Permintaan Fasilitas Kementerian/Lembaga/ Daerah Yang Terpenuhi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase permintaan fasilitas K/L/D yang terpenuhi	100%	100%	100%

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dari unit-unit kerja di lingkungan LAN adalah memberikan fasilitas, advokasi, dan perkonsultasian dalam bidang diklat, kajian dan inovasi. Pihak-pihak yang memanfaatkan/memerlukan fasilitas dari LAN meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan kecamatan dan Pemerintahan Desa. K/L/D yang mendapatkan fasilitasi antara lain Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Makassar dan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan kepada para stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2. Fasilitasi bidang pelayanan publik
3. Fasilitasi bidang SDM aparatur dan kediklatan
4. Fasilitasi bidang perencanaan, protokol dan kearsipan
5. Fasilitasi bidang pengawasan
6. Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Fasilitasi bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa
8. Fasilitasi kerjasama internasional bidang administrasi negara
9. Fasilitasi bidang pembinaan analis kebijakan

Pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan fasilitasi dengan jumlah kegiatan fasilitasi yang dapat dipenuhi, dengan angka pencapaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%. Permintaan fasilitasi yang disampaikan kepada LAN semaksimal mungkin direspons dan dipenuhi dengan mendayagunakan sumber daya (resources) yang tersedia. Dengan kata lain, permintaan fasilitasi atau perkonsultasian kepada LAN terealisasi sepenuhnya (100%).

Dari catatan yang ada, keberhasilan LAN dalam pemenuhan permintaan fasilitasi tersebut dari tahun ke tahun cukup memuaskan kalangan internal maupun eksternal LAN. Beberapa kegiatan fasilitasi LAN mendapat respon yang sangat positif dengan disepakatinya permintaan untuk pemberian fasilitasi lanjutan. Pada fase ini, fasilitasi lanjutan dapat berupa



Prosentase Permintaan Advokasi Bidang Administrasi Negara
Dari Instansi Lain yang terpenuhi



tindak lanjut fasilitasi sebelumnya, dan juga perluasan bidang fasilitasi yang diminta untuk dapat dipenuhi oleh LAN. Hal ini nampak dari fasilitasi di beberapa tempat yang sekaligus mencakup bidang sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta bimbingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bentuk Fasilitasi LAN 2014

Bentuk Fasilitasi	Jumlah Permintaan Fasilitasi K/L/D	Jumlah Permintaan Fasilitasi K/L/D yang terpenuhi
1. Fasilitasi penataan organisasi untuk pemerintah Provinsi [1 Pem Prov] dan Kabupaten/kota [8 Pemkab/kota]	9	9
1. Fasilitasi Kementerian/Lembaga non kementerian/daerah [3]	16	16
2. Fasilitasi instansi luar negeri [13 Organisasi internasional/negara]		
1. Fasilitasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan[3]	8	8
2. Fasilitasi bidang pelayanan publik [1]		
3. Fasilitasi bidang SDM aparatur dan kediklatan[3]		
4. Fasilitasi bidang perencanaan [1]		
1. Advokasi tatakelola Pemerintahan dan Kelembagaan pemerintahan Desa [2 desa], dan	3	3
2. Workshop Strategi Pengelolaan keuangan Daerah [1 Kabupaten]		
1. Fasilitasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan[13]	30	28
2. Fasilitasi bidang pelayanan publik [9]		
3. Fasilitasi bidang SDM aparatur dan kediklatan[2]		
4. Fasilitasi bidang Reformasi Birokrasi [2]		
5. Fasilitasi bidang perencanaan [2]		
Konsultasi/Advokasi Kediklatan	332 tamu	332 tamu

Bentuk Fasilitas	Jumlah Permintaan Fasilitas K/L/D	Jumlah Permintaan Fasilitas K/L/D yang terpenuhi
1. Fasilitas penataan organisasi untuk pemerintah Provinsi [1 Pem Prov] dan Kabupaten/kota [8 Pemkab/kota]	9	9
1. Fasilitas Kementerian/Lembaga non kementerian/daerah [3]	16	16
2. Fasilitas intansi luar negeri [13 Organisasi internasional/negara]		
1. Fasilitas bidang organisasi dan ketatalaksanaan[15]	56	56
2. Fasilitas bidang pelayanan publik [14]		
3. Fasilitas bidang SDM aparatur dan kediklatan[23]		
4. Fasilitas bidang pengawasan [1]		
5. Fasilitas bidang perencanaan [2]		
Fasilitas bidang kewidyaiswaraan dari instansi lain	45	45
Fasilitas bidang pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	14	14

Sasaran Strategi
06

Terwujudnya Pengembangan Ilmu administrasi negara

IKU 6.1

Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Yang Terpublikasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi Negara , LAN mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi dan Persentase lulusan STIA yang memuaskan yaitu mahasiswa S1 dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun dan mahasiswa S2 dengan IPK di atas 3,25 dengan masa studi di bawah 2 tahun.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi	30	43	143%



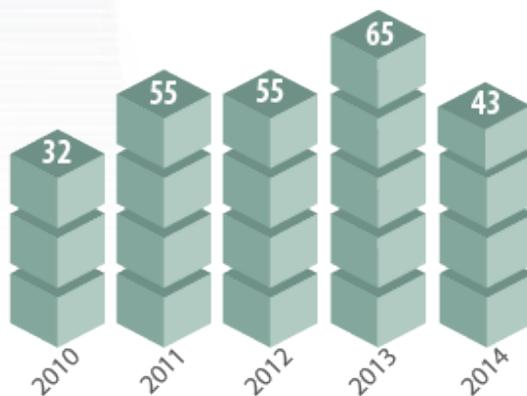
Delegasi LAN di The 4th Annual Conference of Asian Group for Public Administration (AGPA)

Penerbitan di bidang ilmu administrasi ini merupakan bentuk kontribusi LAN dalam pengembangan ilmu administrasi dengan menghasilkan berbagai penerbitan ilmiah dalam bentuk Jurnal, Buku dan hasil Penelitian. Beberapa jurnal yang sudah diterbitkan oleh satuan-satuan unit kerja di lingkungan LAN antara lain: Jurnal Wacana Kinerja (Bandung), Jurnal Kapita Selekta (Jakarta), Jurnal Good Governance

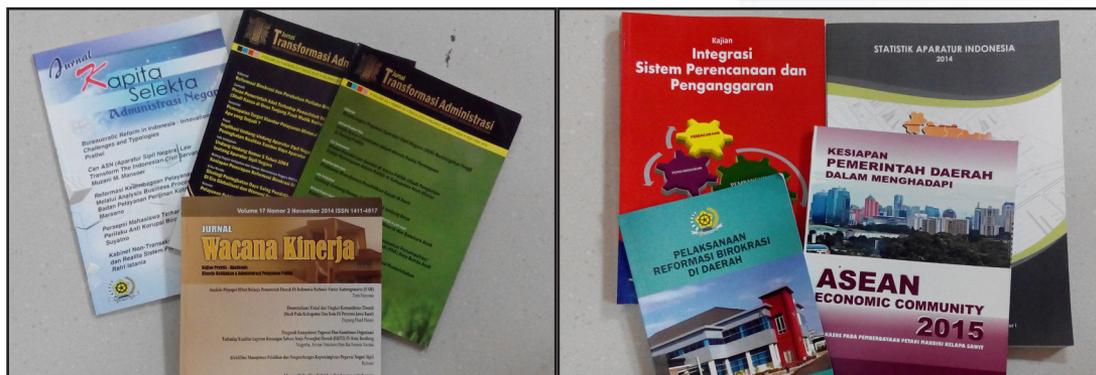
(Jakarta), Jurnal Administrasi Negara (Makassar), Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Makassar), Jurnal Ilmu Administrasi (Bandung), Jurnal Borneo (Samarinda), dan Jurnal Transformasi Administrasi (Aceh). Para peneliti dan dosen juga menulis artikel atau membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan oleh LAN. Selain itu terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang dimuat dalam publikasi dan media lain di luar yang diterbitkan oleh LAN seperti Jurnal MiMBAR Unisba, Jurnal Legislasi, Jurnal Widyariset LIPI, Jurnal Gema Perpustakaan dan Arsip maupun Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Untuk memenuhi salah satu misi LAN dalam pengembangan ilmu administrasi negara, LAN secara aktif juga berkontribusi dalam *knowledge sharing/experience* dalam bidang ilmu administrasi negara. Untuk itu LAN bergabung secara aktif dalam berbagai organisasi internasional dalam bidang pengembangan ilmu administrasi negara, antara lain International Institute of Administrative Science (IIAS), IASIA, Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Asian Group for Public Administration (AGPA), dan sebagainya . Hampir setiap tahun LAN mengirimkan delegasinya pada acara Seminar, kongres/konferensi, workshop, dan forum lainnya,

Jumlah penerbitan ilmiah dibidang ilmu administrasi



Beberapa Karya Ilmiah Hasil Penelitian Mandiri Yang diterbitkan



yang berkaitan dengan administrasi negara. Paper yang dipresentasikan pada forum-forum tersebut selanjutnya dipublikasikan oleh institusi yang bersangkutan dalam proceeding atau bentuk lainnya. Beberapa forum internasional di mana representative dari LAN mempresentasikan karya tulisnya pada tahun ini, antara lain adalah International Institute of Administrative Science (IIAS) Congres di Morocco,

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penerbitan karya tulis ilmiah yang dihasilkan lebih rendah. Hal ini terkait dengan perampingan organisasi di LAN yang berimplikasi pada berkurangnya unit kajian yang sebelumnya menerbitkan beberapa karya ilmiah dan berkurangnya kegiatan kajian. Kondisi ini telah diprediksikan sebelumnya sehingga target yang ditetapkan pada tahun ini hanya 30. Berkurangnya terbitan yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemotongan anggaran yang berimplikasi pada pemotongan anggaran pada beberapa jurnal dan pengurangan anggaran untuk mengirimkan delegasi pada forum konferensi internasional di luar Indonesia, sehingga terdapat beberapa artikel yang tidak dapat dipresentasikan. Namun demikian dari target sebesar 30 yang ditetapkan, LAN berhasil menghasilkan 43 penerbitan dengan persentase capaian sebesar 143%, melebihi target yang ditetapkan. Hal ini antara lain karena beberapa pegawai berhasil menerbitkan artikel pada jurnal eksternal. Selain itu terdapat artikel yang mendapatkan sponsor dari penyelenggara forum internasional untuk dipresentasikan dan adanya konferensi internasional yang diselenggarakan di Jakarta.

Tabel Karya Tulis Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi

Jenis Terbitan	Jumlah
Jurnal LAN	12
Jurnal Eksternal	5
Buku	9
International Conference/Forum	10
Penelitian Mandiri	5
Seminar Nasional	3
Jumlah	44

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan	S1 = 75% S2 = 65%	S1 = 79.21% S2 = 41.24%	84.53 %

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) merupakan salah satu unit kerja LAN dibidang pendidikan tinggi. Dengan tugas menyelenggarakan program pendidikan dibidang ilmu administrasi bagi Aparatur Sipil Negara

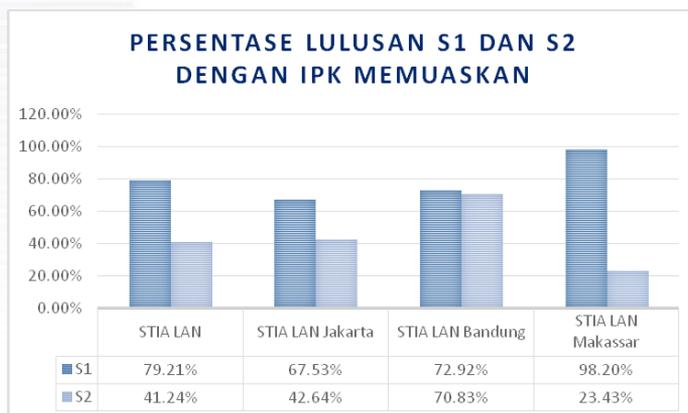
Untuk mengukur keberhasilan pendidikan di STIA ini digunakan pengukuran berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan STIA, baik untuk program studi Sarjana S1 maupun S2. IPK merupakan alat ukur prestasi dibidang akademik/ pendidikan yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif .

Kriteria pengukuran indicator kinerja ini adalah

- Lulusan S1 dengan IPK minimal 3 dan masa studi kurang atau sama dengan 5 tahun
- Lulusan S2 dengan IPK minimal 3,25 dan masa studi kurang atau sama dengan 2 tahun

Hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

STIA	S1			S2		
	Lulusan	Nilai ≥ 3	%	Lulusan	Nilai $\geq 3,25$	%
STIA LAN	505	400	79.21%	468	193	41.24%
STIA LAN Jakarta	194	131	67.53%	197	84	42.64%
STIA LAN Bandung	144	105	72.92%	96	68	70.83%
STIA LAN Makassar	167	164	98.20%	175	41	23.43%



Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan persentase lulusan S1 dengan predikat memuaskan (IPK ≥ 3 dan masa studi maksimal 5 tahun) adalah

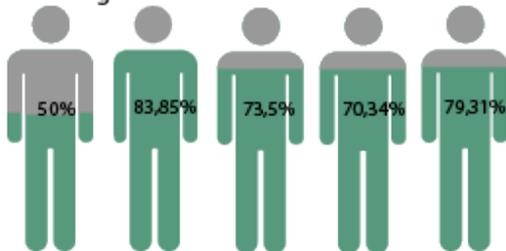
79,21% (400 orang dari 505 orang lulusan). Nilai ini merupakan akumulasi dari lulusan ketiga STIA. Meskipun STIA LAN Jakarta dan Bandung masih di bawah target, namun persentasenya sudah di atas 65%, dan didukung dengan persentase dari STIA LAN Makassar yang tinggi 98,20%, sehingga persentase lulusan dengan IPK minimal 3 (memuaskan) sudah memenuhi target 75%, jadi capaian lulusan S1 adalah 105,61%.



Persentase lulusan S2 dengan predikat memuaskan (IPK $\geq 3,25$ dan masa studi maksimal 2 tahun) adalah 41,24% (193 orang dari 468 orang lulusan). Nilai ini merupakan akumulasi dari lulusan ketiga STIA. Persentase lulusan dengan predikat memuaskan di STIA LAN Jakarta dan Makassar

memang masih rendah

Presentase Lulusan STIA dengan IPK Diatas 3.00 dengan Masa Studi di Bawah 5 Tahun



42,64% dan 23,43%), hanya persentase lulusan dari STIA LAN Bandung yang melampaui target 70,83%, sehingga secara keseluruhan masih dibawah target. Jadi capaian lulusan S2 41,24% dari target 65% adalah 63,45%.

Secara keseluruhan capaian IKU ini $(105,61\% + 63,45\%)/2$ adalah **84,53%**.

Pada tahun ini terdapat peningkatan hasil akreditasi pada STIA LAN Makassar. Sehingga pada tahun ini STIA LAN Makassar telah terakreditasi A.

Sasaran Strategi
07

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana, dan SDM Aparatur LAN yang Profesional, serta Akuntabilitas Lembaga Administrasi Negara

IKU 7.1

Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan LAN

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN	WTP	WTP	100%



Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tujuh tahun berturut-turut (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013). Hal ini

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan LAN



merupakan bukti LAN terus meningkatkan performance (kinerja) dan layanan kepada stakeholdernya. Opini WTP adalah capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Opini BPK RI atas laporan keuangan sepenuhnya ditentukan oleh komitmen, disiplin, dan partisipasi aktif dari seluruh pimpinan dan pegawai kementerian/lembaga dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara efektif, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk membenahi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil pemeriksaan BPK untuk LAN Tahun 2013 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LAN telah berupaya untuk memperbaiki dengan melakukan perombakan fundamental mulai dari sisi perencanaan, pengelolaan keuangan, pengolahan aset, monitoring dan evaluasi terutama juga dengan sistem pengendalian internnya. LAN juga melakukan pembenahan database kemahasiswaan antara lain terkait dengan status akademis mahasiswa dengan mengembangkan aplikasi sistem kemahasiswaan yang handal, melalui pengembangan simak (Sistem Informasi Akademik).

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih harus dibenahi terkait dengan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh LAN. Untuk itu upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh LAN, antara lain :

1. Pembenahan dalam pengelolaan persediaan khususnya lebih mengoptimalkan sistem pengendalian internal melalui pendayagunaan tim stock opname dalam melakukan updating barang persediaan.
2. LAN lebih cermat dalam membuat laporan rekapitulasi kehadiran pegawai.

IKU 7.2

Skor Evaluasi SAKIP LAN

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Skor Evaluasi SAKIP LAN	70	70,03	100%

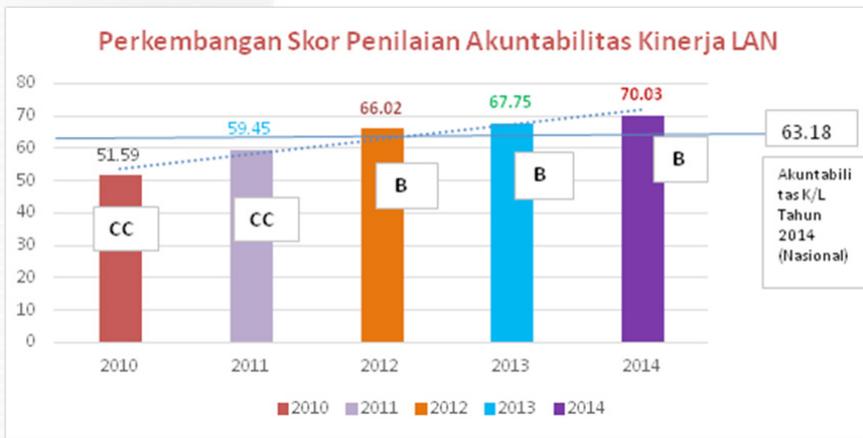
Indikator Kinerja yang kedua untuk sasaran ketujuh adalah “Skor Evaluasi Sakip LAN”. Untuk indikator ini LAN menargetkan nilai 70 untuk hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan tahun 2014. Target tersebut telah tercapai dengan diperolehnya nilai 70,03 (kategori ‘B’) berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2916/M.PANRB/08/2014, tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP LAN Tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP LAN Tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Komponen yang dinilai	Bobot	2010	2011	2012	2013	2014
a. Perencanaan Kinerja	35	18.84	21.92	24.69	25.07	24,72
b. Pengukuran Kinerja	20	11.17	11.65	12.85	13.02	14,48
c. Pelaporan Kinerja	15	7.38	9.88	10.50	10.71	11,21
d. Evaluasi Kinerja	10	4.25	4.32	4.91	5.53	5,89
e. Capaian Kinerja	20	9.95	11.68	13.07	13.42	13,73
Nilai Hasil Evaluasi		51.59	59.45	66.02	67.75	70,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	B	B	B

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan dalam aspek pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.



Menilik perkembangan Skor SAKIP LAN dari tahun ke tahun (periode 2010-2014), terdapat perkembangan positif hasil penilaian akuntabilitas LAN. Di dibandingkan dengan nilai Akuntabilitas K/L secara nasional yang mencapai 63.18, pada tahun 2014, nilai akuntabilitas LAN berada di atas nilai nasional.

IKU 7.3 **Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan	705 orang	752 orang	(Tercapai 106,67%)

Bagian Sumber Daya Manusia Lembaga Administrasi Negara memiliki peranan strategis dalam melakukan pembinaan kepegawaian dan peningkatan kompetensi/kapasitas dengan program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Keseluruhan program ini ditetapkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pembinaan sumber daya manusia. Salah satu sasaran strategis ke-7 dari penetapan kinerja adalah terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga. Adapun salah satu indikator kinerja utama (IKU 18) dari sasaran strategis ke-7 adalah persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia adalah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar/workshop dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk peningkatan kompetensi pegawai LAN termasuk di dalamnya Diklat Teknis dan Fungsional, pada lembaga-lembaga diklat atau instansi-instansi penyelenggara lainnya yang terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri. Program peningkatan kapasitas SDM, secara keseluruhan dalam bentuk:

1. Pendidikan formal (tugas belajar dan Ijin Belajar)
2. Seminar/workshop
3. Diklat teknis
4. Diklat fungsional
5. Diklat kepemimpinan
6. Diklat prajabatan

Pengembangan pegawai antara lain dilakukan melalui tugas belajar dan pemberian ijin belajar. LAN mengirimkan pegawainya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar dan pemberian ijin belajar baik pada institusi pendidikan dalam negeri maupun pada institusi pendidikan di luar negeri. Pengiriman tugas belajar dan ijin belajar pada Institusi pendidikan dalam negeri misalnya pada Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran. Sementara untuk pengiriman tugas belajar antara lain pada University of Birmingham, University of Twente, University of Groningen, GRIPS, dan sebagainya.

Seminar atau workshop yang diikuti merupakan jenis diklat/seminar yang telah dipilih berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (*Training Needs Analysis*) sedangkan diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai sesuai dengan persyaratannya. Dengan demikian berarti bahwa diklat yang dipilih adalah jenis diklat yang sesuai kebutuhan dan manfaat yang akan diperoleh yang mendukung pelaksanaan tugas.

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai baik kompetensi bidang atau kompetensi teknis dari masing-masing jabatan yang dipangkunya. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Adanya peningkatan kompetensi bagi pegawai di lingkungan LAN mengacu pada standar kompetensi yang dipersyaratkan;
2. Tercapainya distribusi kompetensi pegawai di lingkungan LAN yang mengacu pada standar kompetensi yang dipersyaratkan;

Terkait dengan ini, masalah yang dihadapi antara lain perlu adanya perencanaan dan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi SDM yang lebih detail.

Diklat yang dipilih adalah jenis diklat yang sesuai kebutuhan dan manfaat yang akan diperoleh yang mendukung pelaksanaan tugas.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat disiplin pegawai	80%	98,74%	123.42%

Untuk indikator tingkat disiplin pegawai tahun, diukur dari rata-rata kehadiran selama setahun. Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara secara langsung sangat mempengaruhi kedisiplinan pegawai dalam kehadiran. Meski secara gradual prosentasi kehadiran dalam penghitungan kinerja diturunkan dari 60% menjadi 40% di tahun 2014 yang juga selaras dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang ditindaklanjuti Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011, merupakan salah satu penguangkit peningkatan kedisiplinan dalam hal kehadiran. Ini terlihat dari target tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada tahun 2014 sebesar 80% realisasinya mencapai 98,74%.

Untuk selanjutnya, Bagian Sumber Daya Manusia Lembaga Administrasi Negara memiliki peranan strategis dalam melakukan pembinaan kepegawaian salah satunya adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin para pegawai di lingkungan LAN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, bahwa disiplin pegawai sangat penting dan berpengaruh positif terhadap perilaku pegawai yang akan mempengaruhi hasil dan prestasi kerjanya.

Adanya peraturan yang mengikat dan sanksi-sanksi yang ada, dapat membatasi perilaku pegawai agar tidak melakukan kesalahan dan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan, karena apabila mereka melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Perilaku disiplin pegawai bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi perlu pembentukan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tujuan dan kemampuan pekerjaan, teladan pimpinan, kesejahteraan, pengawasan melekat, sanksi hukum, ketegasan dan hubungan kemanusiaan, oleh karena itu pembentukan perilaku disiplin pegawai dapat dilakukan dengan cara menghindari pelanggaran dan mengecilkan pelanggaran yang terjadi.

Dalam menegakan disiplin pegawainya, Bagian SDM LAN telah mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada beberapa pegawai di LAN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap disiplin selama kurun waktu 2014 (lihat indikator hukuman disiplin). Pemberian hukuman disiplin tersebut bervariasi sesuai dengan

jenis pelanggaran yang telah dilakukan, yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, hingga hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tabel Penegakan Disiplin Rentang Tahun 2011-2014

NO	Jenis Hukuman	Jumlah Kasus Penegakan Disiplin			
		2011	2012	2013	2014
1	Hukuman Ringan	1	-	1	2
2	Hukuman Sedang	3	2	2	-
3	Hukuman Berat	-	-	-	2

IKU 7.5

Indeks Kesiapan Penerapan E-Government

Indikator Kinerja Utama			Target	Realisasi	%Capaian
Indeks E-Government	Kesiapan Penerapan		2	1.98	99%

E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan stakeholder. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik, peningkatan interaksi antar institusi, dan manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, atau pengurangan biaya.

Untuk menilai kesiapan penerapan e-governemnt di LAN, digunakan data Pemingkatan e-Government Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan PEGI (Pemingkatan



e-Government Indonesia). Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. Untuk itu PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. Terkait hal ini, PeGI diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK

Hasil PEGI Lembaga Administrasi Negara tahun 2014 adalah 1,98. Hasil ini kurang dari target yang ditetapkan LAN (sedang atau equivalent dengan nilai PeGi 2). Di banding dengan K/L lainnya, hasil PeGI LAN masih dikategorikan kurang. Namun demikian, LAN telah berupaya mengintensifkan pengembangan IT-nya. Pengumpulan data PeGi 2014 pada Lembaga Administrasi Negara dilakukan pada Januari 2014. Dengan demikian upaya perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan oleh LAN belum terekam dalam data PeGI 2014. LAN telah melakukan beberapa pembaharuan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari segi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dari sisi instrumen, PeGI, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penilaian seperti pada sisi kelembagaan. Untuk level instansi tingkat pusat, keberadaan unit pengelola TIK di LAN yang berada pada level eselon 4 membuat kewenangan terasa sangat kurang dan mengurangi penilaian. Namun demikian, melihat pada ukuran organisasi yang relative kecil dibanding institusi lain, tidak memungkinkan pengelolaan TIK di LAN pada level eselon 2.

Lembaga Administrasi Negara telah menyusun Grand Disain TIK 2014–2019. Di samping itu LAN juga mengintensifkan pengembangan aplikasi, antara lain :

1. Memiliki website yang dinamis dan selalu terupdate (www.lan.go.id)
2. Aplikasi yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara antara lain :

No.	Aplikasi	Unit Pengembang
1	E Office (Makarti/Manajemen Perkantoran bersasikan TI),	Biro PH2P
2	SIDA (Sistem Diklat Aparatur)	P3D
3	SITKP (Sistem Informasi Tunjangan dan Kehadiran Pegawai)	SDM
4	SP2K (Sistem Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan)	Biro PH2P
5	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Biro PH2P
6	SIK (Sistem Informasi Keuangan)	Biro Umum

7	SI JFAK (Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan)	JFAK
8	SIMAK STIA (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Akademik)	STIA
9	Monitoring Diklat	KAN
10	Sistem Informasi Perpustakaan	Perpustakaan
11	Email LAN	Biro PH2P
12	Monev	PKP2A I
13	Data Aparatur	PKP2A I
14	Advokasi	PKP2A I
15	Litbang	PKP2A I

Pengembangan TIK yang secara terus menerus juga akan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara seiring dengan pengembangan TIK dimasa mendatang dan kebutuhan TIK pada Lembaga Administrasi Negara.

Rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara antara lain :

1. Pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga penggunaannya efektif dan efisien.
2. Penyempurnaan Aplikasi yang telah ada sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
3. Penggunaan Open Source pada beberapa PC sehingga akan menghemat anggaran pengadaan Operating System.



Indikator Lainnya

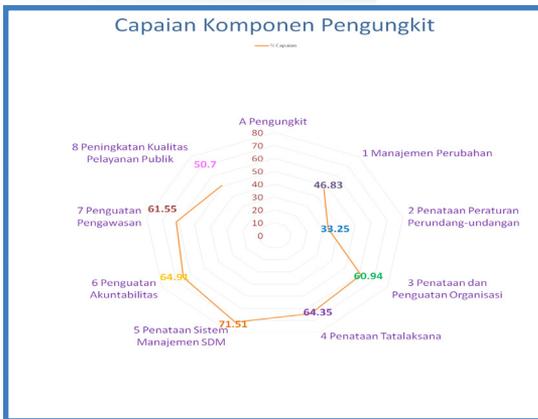
1

Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2014 merupakan tahun pembuktian LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang telah menetapkan langkah untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Tahun ini menandai akhir pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi LAN 2011-2014, di mana hampir seluruh program yang dicanangkan telah dilaksanakan.

Terkait dengan *Manajemen Perubahan*, awal tahun dilakukan Transformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja melalui nilai-nilai baru LAN dengan sasaran untuk perubahan pola pikir dengan menyosialisasikan dan menginternalisasi manajemen perubahan dengan harapan LAN mampu menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi di bidang pelayanan masyarakat.

Untuk area *Penataan Peraturan Perundang-undangan* dilakukan review atas



sejumlah peraturan perundang-undangan LAN. Revisi atas peraturan kepala LAN di bidang diklat juga dilakukan khususnya untuk mendukung pelaksanaan Diklat Aparatur pola baru. Dari sisi *penataan dan penguatan organisasi*, pada tahun 2014 LAN mulai menerapkan Struktur organisasi sesuai Perpres 57 tahun 2013 tentang LAN dan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja LAN. Di samping itu, untuk memperbaiki aspek *Penataan Tata Laksana*, LAN berupaya meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dengan menetapkan Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan perbaikan dalam keterbukaan informasi publik melalui integrasi website www.lan.go.id.

Dalam *Penataan Sistem Manajemen SDM*, sejumlah perbaikan telah dilakukan di tahun 2014, seperti penyesuaian Peta Jabatan dan Grading, Pengembangan

Pegawai Berbasis Kompetensi, Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.

Penguatan Akuntabilitas antara lain dilakukan melalui perbaikan perencanaan kinerja, evaluasi akuntabilitas unit kerja, dan perbaikan monitoring kinerja. *Penguatan pengawasan* dilakukan antara lain dengan menerapkan Whistle Blowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa pada LAN, Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System di LAN, maupun Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LAN.

Sementara dalam aspek *peningkatan pelayanan publik*, LAN berupaya meningkatkan Standar Pelayanan dan budaya pelayanan prima, menyediakan media pengaduan pelayanan, serta mengintensifkan pemanfaatan teknologi Informasi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional.

Hasilnya, pada tahun 2014 LAN mendapatkan penilaian Indeks RB LAN sebesar 60,59, termasuk dalam kategori B. Untuk penilaian 8 area perubahan, capaian komponen pengungkit LAN mencapai 59,88, dengan penilaian tertinggi pada aspek Penataan Sistem Manajemen SDM. Sementara untuk capaian komponen hasil, LAN mendapatkan nilai 61,65 dengan capaian tertinggi pada komponen kualitas pelayanan

publik.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indeks RB LAN dapat dikatakan baik. Berdasarkan olah data dari sipan.menpan.go.id, dari 76 K/L terdapat 3 K/L (3.9%) mendapat nilai BB. Sebanyak 20 (26%) dari 76 K/L mendapat nilai B, termasuk LAN. Sementara 29 K/L (38%) mendapat nilai CC dan 24 K/L (31%).

Dengan hasil tersebut, LAN telah menentukan sejumlah langkah kongkrit untuk terus melaksanakan reformasi antara lain dengan terus melakukan inovasi dalam pelayanan, perbaikan pada 8 area perubahan dan konsisten melaksanakan langkah-langkah reformasi birokrasi secara berkesinambungan.

2

Analisis Capaian Keuangan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (financial accountability) dan akuntabilitas kinerja (Performance accountability). Dengan pola pertanggung jawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil- hasil yang dicapai.

Pada tahun anggaran 2014, LAN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.236.818.273.000 (dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). Namun dalam perkembangannya terdapat kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga sehingga pagu anggaran LAN berubah menjadi sebesar Rp.222.099.168.000 (dua ratus dua puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Kebijakan ini terjadi dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 pada tanggal 17 Mei 2014, tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Didalamnya antara lain mengatur bahwa LAN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah diinstruksikan untuk melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program/kegiatan yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan. Dengan jumlah penghematan dan pemotongan yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp 32.813.616.000.

Pemotongan ini agak sulit dilaksanakan karena harus dilaksanakan setelah beberapa kegiatan dilaksanakan (pertengahan tahun anggaran). Pemotongan tidak dapat dilakukan pada anggaran untuk Belanja operasional, Belanja multiyear (karena pembangunan gedung sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan berakhir pembangunannya pada bulan Juni 2014 berdasarkan kontrak), PNPB dan Prioritas

Bidang (Nasional). Jadi pemotongan hanya dapat dilakukan pada anggaran Belanja Non Operasional untuk Prioritas K/L, dimana anggaran tersebut telah dialokasikan untuk membiayai paket-paket kegiatan bidang kajian, inovasi dan pembinaan/ penyelenggaraan diklat aparatur serta teknis lainnya. Hal ini telah disampaikan dalam Surat Permohonan Dispensasi Penghematan kepada Ketua Komisi II DPR dan Menteri Keuangan, agar pemotongan anggaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran LAN Tahun 2014.

Besaran jumlah pemotongan dalam Instruksi Presiden tersebut berubah dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tertanggal 14 Juni 2014, tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2014. Jumlah pemotongan untuk LAN berubah menjadi sebesar Rp 14.117.876.000I, dengan rincian jumlah pemotongan anggaran di masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

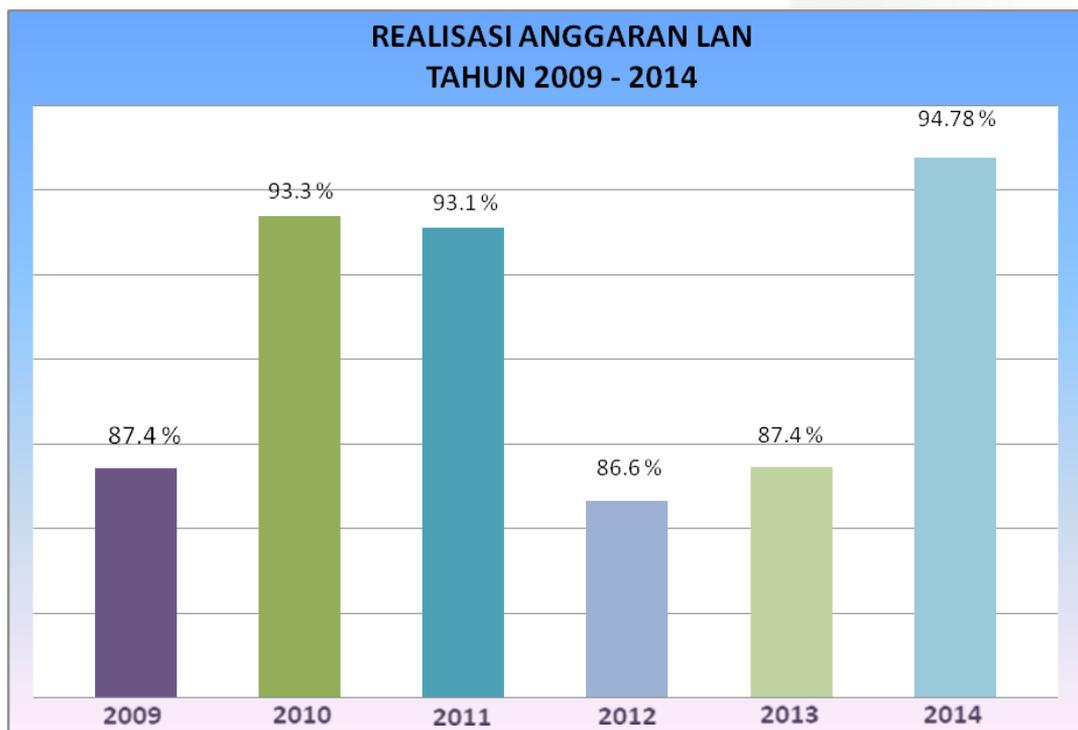
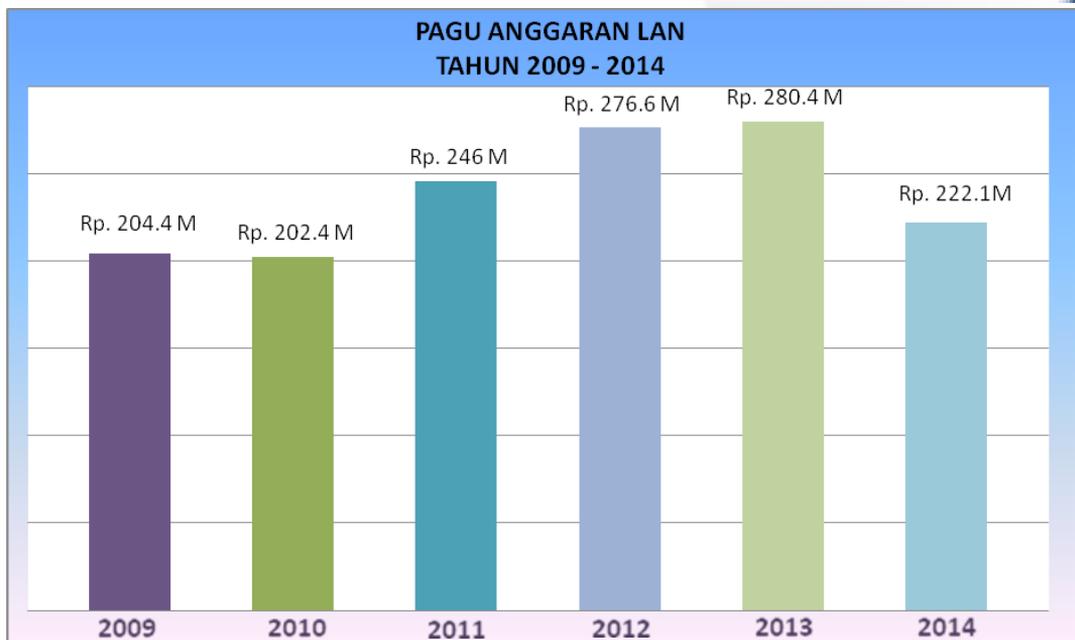
Jumlah Pemotongan Anggaran Per Satker

Satuan Kerja	Pemotongan
LAN Jakarta	12,336,112,000
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I	675,282,000
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II	293,795,000
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III	386,928,000
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV	40,000,000
STIA LAN Jakarta	144,085,000
STIA LAN Bandung	133,420,000
STIA LAN Makassar	108,254,000
Total Pemotongan	14,117,876,000

Kebijakan ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di LAN, karena beberapa kegiatan mengalami pengurangan anggaran bahkan ada yang yang dihapuskan, seperti kegiatan Diklat Reform Leader Agency, dan Akreditasi Lembaga Diklat, sehingga berpengaruh pada capaian sasaran strategis dan Indikator kinerja LAN, sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya.

Dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran Tahun 2013 dimana LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.280.464,766.000 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah), maka pada Tahun 2014 pagu anggaran yang dimiliki LAN mengalami penurunan sebesar Rp. 58.365.598.000 (lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah). Untuk Tahun 2014 ini LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.222.099.168.000 (dua ratus dua puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran LAN dari tahun 2009 s.d. 2014 secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Dari pagu anggaran LAN Tahun 2014 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 4(empat) program yang menyebar di 8 (Delapan) satuan kerja yang ada. Alokasi anggaran per program dan satker tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Program LAN dan Realisasi TA 2014

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	Dukungan manajemen dan teknis lainnya	134.147.764.000	131.800.531.484	98.11
2	Pengkajian administrasi Negara dan diklat aparatur	46.287.162.000	40.783.942.307	88.03
3	Peningkatan sarana dan prasarana	20.000.000	19.999.997.428	100.00
4.	Program Pendidikan Kedinasan	21.664.242.000	17.924.909.782	82.55
Jumlah		222.0999.168.000	210.509.381.001	94.78

Cat. 2014 (Un-Audited)

Data Pagu Satuan Kerja LAN TA 2014

NO	KODE /NAMA SATKER		PAGU
1	450417	LAN JAKARTA	110.365.384.000
2	662621	STIA LAN jakarta	18.233.856.000
3	450423	PKP2A I LAN	11.944.234.000
4	662635	STIA LAN bandung	17.608.820.000
5	450432	PKP2A II LAN	18.231.935.000
6	662642	STIA LAN Makasar	13.379.534.000
7	662656	PKP2A III LAN	8.048.645.000
8	680612	PKP2A IV LAN Aceh	24.286.760.000
JUMLAH TOTAL			222.099.168.000

Penyerapan anggaran Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014 bila dibandingkan dengan Tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan, hal ini bisa dilihat dari hasil prosentase realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2013 sebesar 87.4% naik menjadi 94,78% di tahun 2014. Peningkatan ini di sebabkan oleh semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang telah di susun oleh masing-masing unit kerja yang ada, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat di realisasikan.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa alokasi terbesar dari anggaran yang ada di gunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dan dan teknis Lainnya

yaitu sebesar Rp. 134.147.764.000,-(Seratus Tiga puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah). Program selanjutnya yang mendapat alokasi terbesar kedua adalah program pengkajian Administrasi Negara dan diklat Aparatur sebesar Rp. 46.287.162.000,- (Empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah). Program ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana, yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,-(Dua puluh milyar rupiah). Dan program pendidikan kedinasan sebesar 21.664.242.000 (Dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dari pagu anggaran LAN tahun 2014 sebesar Rp. 222.099.168.000 telah berhasil membiayai pelaksanaan kegiatan dengan Persentase penyerapan anggaran tahun 2014 sebesar 210.509.381.001 atau sebesar 94.78% (Un-Audited).

Data pagu anggaran dan realisasi pada setiap satuan kerja yang ada di LAN tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Realisasi Per Satker di LAN TA 2014

NO	KODE	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	450417	LAN JAKARTA	110.365.384.000	106267957774	96,29
2	662621	STIA LAN JAKARTA	18.233.856.000	15.088.635.923	82,75
3	450423	PKP2A I LAN	11.944.234.000	11.503.291.978	96,31
4	662635	STIA LAN BANDUNG	17.608.820.000	17.009.929.029	96,60
5	450432	PKP2A II LAN	18.231.935.000	16.528.844.782	90,66
6	662642	STIA LAN MAKASAR	13.379.534.000	12.420.570.150	92,83
7	662656	PKP2A III LAN SAMARINDA	8.048.645.000	7.666.567.636	95,25
8	680612	PKP2A IV LAN ACEH	24.286.760.000	24.023.583.729	98,92
JUMLAH TOTAL			222.099.168.000	210.509.381.001	94,78

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian penyerapan anggaran di LAN mencapai lebih dari 90%. Besarnya capaian kinerja anggaran ini di sebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

BAB IV PENUTUP



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2014. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas LAN dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara.

Pada tahun 2014, LAN menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Mengacu kepada tujuh sasaran yang diukur dengan 20 IKU tersebut, secara umum dari 20 indikator kinerja berhasil dicapai 16 IKU yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun, bahkan enam indikator dapat melebihi target. Sedangkan empat indikator, belum tercapai targetnya.

Sementara itu, penyerapan anggaran secara keseluruhan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014 bila dibandingkan dengan Tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana dalam tahun 2013 penyerapan anggaran LAN adalah sebesar 87,4%. sedangkan tahun 2014, tingkat penyerapan anggaran LAN mencapai 94,78% (un-audited). Peningkatan ini disebabkan oleh semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang telah di susun oleh masing-masing unit kerja yang ada.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang semakin meningkat bukan berarti dalam perjalanannya tidak ada permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain perubahan kebijakan di bidang keuangan, seperti adanya kebijakan optimalisasi penganggaran, terutama terhadap pos-pos yang terkait dengan perjalanan dinas serta terjadinya beberapa kali revisi terhadap DIPA LAN. Tahun 2014 juga merupakan awal penerapan struktur baru LAN yang lebih terkonsolidasi sehingga menjadi masa transisi bagi LAN. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pencapaian target kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama LAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Lembaga Administrasi Negara untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu ke depan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut LAN akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Perbaikan tersebut antara lain:

1. Terkait bidang kajian kebijakan, perlu dilakukan penajaman substansi kajian, penguatan SDM khususnya penambahan jumlah peneliti, dan menggalakkan diseminasi hasil kajian.
2. Perlu segera dilakukan evaluasi paska diklat dari Diklatpim Pola Baru sehingga akan diketahui kekurangan dan kemanfaatannya.
3. Penguatan STIA dan merintis pembangan sekolah kader.
4. Terus melakukan inovasi dalam pelayanan dan peningkatan kinerja.
5. Perbaikan manajemen internal khususnya dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen akuntabilitas.
6. Melakukan perbaikan pada 8 area perubahan dan konsisten melaksanakan lagkah-langkah reformasi birokrasi secara berkesinambungan.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA
Jabatan : Kepala Lembaga Administrasi Negara

Pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Januari 2014

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan	Persentase hasil kajian kebijakan LAN yang didiseminasikan kepada stakeholders	100%
	Persentase <i>policy paper/policy brief</i> yang dihasilkan dari kajian/telaah kebijakan	100%
Terwujudnya pembaharuan administrasi negara	Jumlah produk inovasi administrasi negara yang dihasilkan	2 model
Terlaksananya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi.	9 Lembaga Diklat
	Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang profesional	90%
	Persentase lulusan Diklatpim dengan predikat minimal memuaskan.	60%
	Persentase pemimpin perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim	80%
	Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar	100%
	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur.	Baik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terselenggaranya pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan yang berkualitas	Persentase kebijakan/ pedoman/konsep/instrumen pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan	100%
	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan	Memuaskan
	Persentase fungsional analis kebijakan yang terseleksi	50%
Profesionalisme Pelaksanaan Fasilitasi	Persentase permintaan fasilitasi K/L/D yang terpenuhi	100%
Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi Negara	Jumlah karya tulis ilmiah bidang ilmu administrasi yang terpublikasi	30
	Persentase lulusan STIA dengan nilai memuaskan	S1 : 75% S2 : 65%
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN.	WTP
	Skor evaluasi SAKIP LAN.	70
	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan	95%
	Tingkat disiplin pegawai	80%
	Indeks Kesiapan Penerapan e-government	Sedang

Jumlah Anggaran Tahun 2014:

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	: Rp. 79.410.962.000-
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	: Rp. 136.407.311.000-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	: Rp. 20.000.000.000-
Jumlah Total	: Rp. 235.818.273.000-

Jakarta, 10 Januari 2014

Kepala Lembaga Administrasi Negara



Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2014**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Administrasi Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2015

Inspektur 1



Etty Kurniasih

NIP. 19580217 198602 2 001

NO		Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>telah menampilkan namun belum lengkap</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>telah menyajikan namun belum lengkap</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya. 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>Ya/tidak</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah disesuaikan dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>belum seluruhnya</p> <p>✓</p> <p>Belum seluruhnya</p>